



**RESPON INDONESIA TERHADAP “KAMPANYE HITAM” EKSPOR
SAWIT OLEH UNI EROPA**

(INDONESIA’S RESPOND AGAINST CRUDE PALM OIL EXPORTS
“BLACK CAMPAIGN” OF EUROPEAN UNION)

SKRIPSI

Oleh:

NAFTHAH RIZKYAN

NIM 140910101002

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2018



**RESPON INDONESIA TERHADAP “KAMPANYE HITAM” EKSPOR
SAWIT OLEH UNI EROPA**

(INDONESIA’S RESPOND AGAINST CRUDE PALM OIL EXPORTS
“BLACK CAMPAIGN” OF EUROPEAN UNION)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

NAFTHAH RIZKYAN

NIM 140910101002

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibu dan Bapak yang senantiasa berusaha keras supaya anak-anaknya terlihat sama dengan yang lain.
2. Prajekan *Big Family* yang selalu mendoakan kelancaran skripsi.
3. Keluarga Theodore yang selalu menemani mencari wifi gratis
4. Kawan-kawan di Paguyuban Gus & Ning Jember yang selalu bergantian bertanya kapan sidang.
5. Keluarga besar UKM University Student English Forum (USEF) yang sudah memberikan wawasan bahasa Inggris.
6. UKM Unej Mengajar yang mengajarkan bagaimana menjadi sabar.
7. Para pengurus Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (Himahi) yang sudah menemani berproses dalam menjalankan organisasi.
8. UKM Paduan Suara FISIP yang sudah memberikan pelajaran betapa pentingnya kedisiplinan dalam bekerja sama.
9. Teman-teman dan pelatih di UKM Basket yang sudah memberi wadah dalam berolahraga.
10. Seluruh anggota *Streetworkout* Jember yang sudah mengajarkan betapa pentingnya hidup sehat.
11. Saudara-saudara Amoeba (Anak Moeda Baratan) yang selalu menemani mencari keringat di sore hari.

MOTTO

*“The best plant, the highest value, the most important commodity, shout it loudly!
That is Palm Oil ”.¹*



¹ Nafthah Rizkyan, Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Nafthah Rizkyan

NIM: 140910101002

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Respon Indonesia Terhadap “Kampanye Hitam” Ekspor Sawit Oleh Uni Eropa” adalah hasil buah pikir saya sendiri, terkecuali kutipan yang sudah saya lampirkan sumbernya, belum pernah diajukan pada lembaga atau institusi manapun, dan bukan karya ilmiah yang menjiplak dari karya orang lain. Saya bertanggung jawab terkait keabsahan dan kebenaran pada isi karya ilmiah ini yang sudah seharusnya dijunjung tinggi

Demikian pernyataan diatas saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun. Saya bersedia mendapat sanksi akademik jika apa yang saya nyatakan tidak sesuai dengan kenyataan.

Jember, 4 Januari 2019

Yang menyatakan

Nafthah Rizkyan

NIM: 140910101002

SKRIPSI

**RESPON INDONESIA TERHADAP “KAMPANYE HITAM” EKSPOR
SAWIT OLEH UNI EROPA**

***INDONESIA’S RESPOND AGAINST CRUDE PALM OIL EXPORTS
“BLACK CAMPAIGN” OF EUROPEAN UNION***

Oleh:

Nafthah Rizkyan

NIM:140910101002

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Sri Yuniati, M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Puji Wahono, M.Si.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Respon Indonesia Terhadap “Kampanye Hitam” Ekspor Sawit Oleh Uni Eropa” telah diuji dan disahkan pada:

hari : Senin
tanggal : 10 Desember 2018
waktu : 09.00
tempat : Ruang Ujian Bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji,
Ketua

Dr. Sunardi Purwoatmoko, MIS.
NIP 196010151989031002

Sekretaris I

Sekretaris 2

Dra. Sri Yuniati, M.Si.
NIP 196305261989022001

Dr. Puji Wahono, M.Si.
NIP 196002011987021001

Anggota I

Anggota 2

Drs. Djoko Susilo, M.Si.
NIP 195908311989021001

Adhiningasih Prabhawati, S.Sos., M.Si.
NIP 197812242008122001

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si.
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Respon Indonesia Terhadap “Kampanye Hitam” Ekspor Sawit Oleh Uni Eropa ; Nafthah Rizkian; 140910101002; 2018; 88 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Minyak kelapa sawit adalah suatu komoditas primadona bagi Indonesia. Indonesia memiliki luas perkebunan kelapa sawit sekitar 11 juta hektar menjadikan Indonesia sebagai negara dengan produksi sawit paling besar di dunia. Banyak negara yang membutuhkan minyak sawit Indonesia. Salah satunya ialah negara-negara di Uni Eropa. Uni Eropa menjadi salah satu tujuan ekspor terbesar Indonesia. Jenis yang paling banyak dibutuhkan ialah minyak sawit mentah atau *Crude Palm Oil* (CPO) yang nantinya akan diolah menjadi produk turunan menjadi seperti makanan maupun campuran biodiesel. Anehnya, Parlemen Eropa mengesahkan Resolusi Sawit yang berisi pelarangan minyak sawit Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa pada tahun 2017. Larangan yang dimaksud ialah minyak sawit yang diperuntukkan untuk bahan campuran biodiesel dengan alasan bahwa minyak sawit Indonesia tidak ramah lingkungan dan mengancam habitat satwa hutan. Indonesia pun meradang dan menganggap Uni Eropa melakukan “kampanye hitam”. Indonesia kemudian melakukan upaya-upaya diplomasi dengan harapan Parlemen Eropa menghapus kebijakannya tersebut. Sayangnya, upaya diplomasi tersebut hingga sekarang masih belum berhasil.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya diplomasi Indonesia terkait permasalahan “kampanye hitam” minyak sawit. Sedangkan fokusnya yakni terkait bagaimana serangkaian proses diplomasi yang sudah dilakukan oleh berbagai elemen. Padahal sudah banyak pihak yang melakukan diplomasi mulai dari Presiden, menteri, anggota DPR, hingga warga sipil juga ikut serta berpartisipasi, namun hasilnya belum memuaskan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu buku cetak, buku elektronik, situs internet dan jurnal ilmiah. Analisis data yang dilakukan yakni menggunakan deskriptif kualitatif. Permasalahan di deskripsikan kemudian dianalisis menggunakan teori sebagai alat bantu untuk membuat analisis yang kemudian diakhiri kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respon yang dilakukan Indonesia adalah dengan memanfaatkan forum Internasional sebagai wadah untuk diskusi dan bernegosiasi. Kemudian respon berikutnya pada tingkat pejabat pemerintahan seperti menteri hingga anggota DPR, Indonesia terus menerus melakukan serangkaian diplomasi dalam bentuk pertemuan, kunjungan kenegaraan hingga menggelar seminar untuk membahas kelapa sawit. Hal tersebut dilakukan untuk meyakinkan bahwa industri sawit Indonesia sudah ramah lingkungan yang dibuktikan dengan adanya sertifikasi dari *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), yang mana ISPO merupakan sebuah lembaga standar sertifikasi sawit yang dimiliki oleh Indonesia. Pada tingkat lembaga pendidikan yang diwakili oleh mahasiswa, juga berkontribusi dengan menciptakan sebuah *role play* yang menjelaskan proses produksi sawit dan mengenalkan pentingnya sawit bagi kehidupan petani kecil.

Kendati demikian kampanye hitam terus berlangsung dan Parlemen Eropa berencana untuk tetap melanjutkan implementasi Resolusi Sawit pada tahun 2030. Hal ini karena isu lingkungan yang masih belum bisa diredam oleh pihak Indonesia. Begitu pula Lembaga Swadaya Masyarakat atau *Non Governmental Organization* (NGO) seperti *Greenpeace* masih tetap mengkritik karena Indonesia melakukan alih fungsi lahan secara terus menerus. Permasalahan lingkungan ini yang digunakan Parlemen Eropa sebagai dasar untuk melarang masuknya sawit Indonesia yang tidak ramah lingkungan alias merusak habitat satwa asli yang kemudian diubah menjadi perkebunan sawit.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu tercurahkan. Atas segala rahmat, petunjuk dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Indonesia Menghadapi “Kampanye Hitam” Ekspor Sawit Oleh Uni Eropa”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ardianto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Bapak Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan dosen wali akademik yang telah membimbing penulis selama jadi mahasiswa.
3. Ibu Dra. Sri Yuniati, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Puji Wahono, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang selalu sabar membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan tugas akhir.
4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat.

Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Namun penulis berharap, apa yang disampaikan di dalam skripsi ini sedikit banyak akan bermanfaat. Terutama bagi pegiat sawit Indonesia yang mempunyai rasa optimis bahwa sawit masih dan akan selalu menjadi komoditas terbaik di negeri ini.

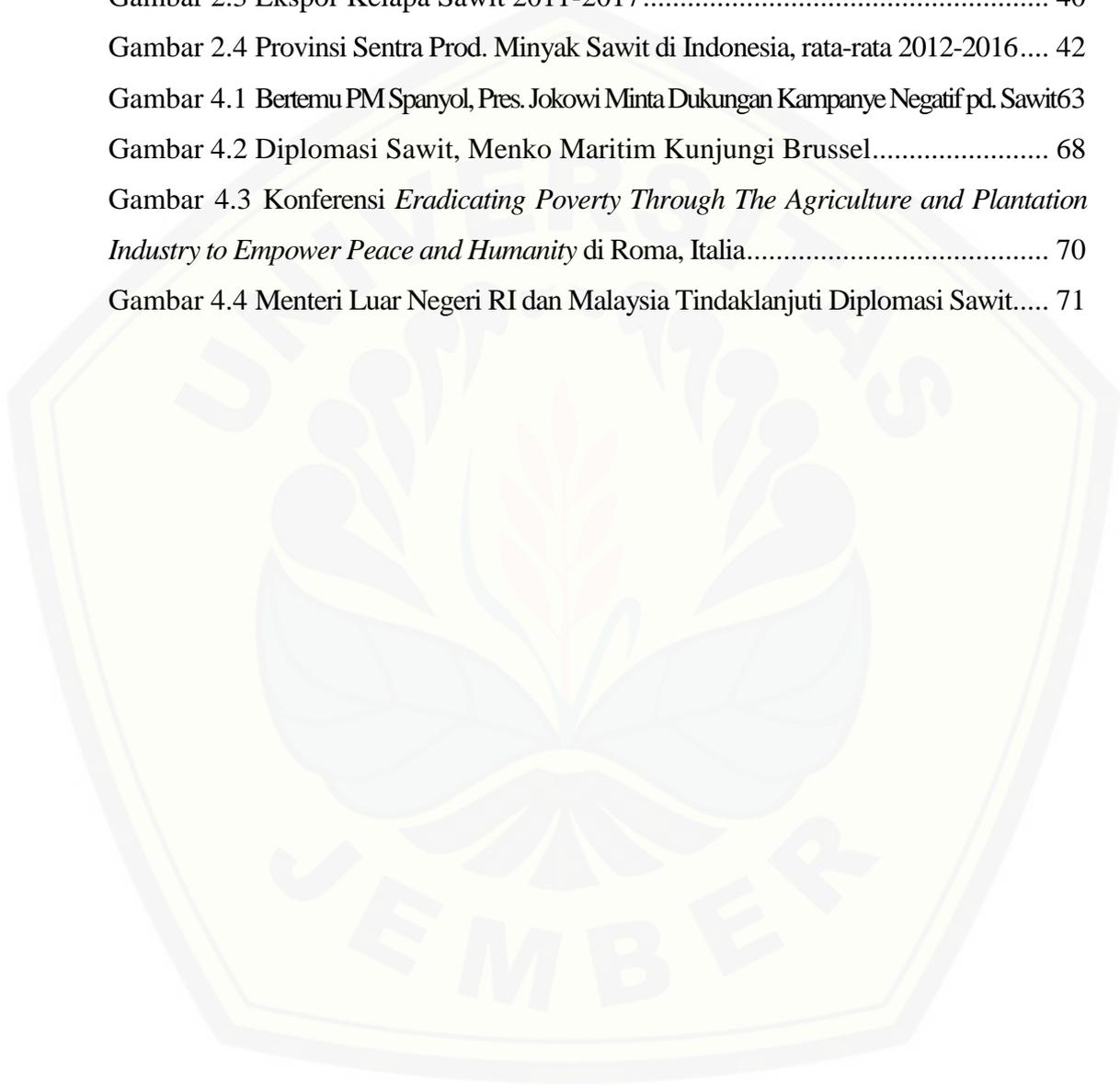
DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN.....	iv
SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Ruang Lingkup Pembahasan	9
1.4.1 Batasan Materi	10
1.4.2 Batasan Waktu	10
1.5 Kerangka Konseptual	10
1.5.1 Konsep Diplomasi Ekonomi	10
1.5.2 Penelitian Terdahulu	19
1.6 Argumen Utama.....	21
1.7 Metode Penelitian.....	21
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data.....	21
1.7.2 Teknik Analisis Data.....	22
1.8 Sistematika Penulisan	22
BAB 2 GAMBARAN UMUM INDUSTRI SAWIT INDONESIA	24
2.1 Kelapa Sawit dan Olahannya	24
2.1.1 Sejarah Kelapa Sawit Indonesia.....	24

2.1.2	Produk Turunan dan Olahan Kelapa Sawit.....	28
2.2	Industri Sawit Indonesia.....	31
2.2.1	Dinamika Industri Sawit Indonesia.....	32
2.3.2	Sertifikasi ISPO.....	35
2.3	Arti Penting Kelapa Sawit Bagi Perekonomian Indonesia.....	39
2.3.1	Perkembangan Ekspor Kelapa Sawit Indonesia.....	39
2.3.2	Proyeksi Produksi Kelapa Sawit Indonesia	41
BAB 3	KAMPANYE ANTI SAWIT OLEH UNI EROPA.....	47
3.1	Perkembangan Kampanye Hitam Sawit.....	47
3.2	Bentuk-bentuk Kampanye Hitam.....	49
3.3.1	Pelabelan Produk Dengan “ <i>Palm Oil Free</i> ”.....	49
3.3.2	Kampanye Hitam Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat.....	50
3.3.3	Hal-hal Yang Ditentang Uni Eropa.....	52
BAB 4	DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA TERHADAP KAMPANYE HITAM ANTI SAWIT UNI EROPA	61
4.1.	Negosiasi Presiden Jokowi Melalui KTT G20 Tahun 2017	62
4.2.	Upaya Diplomasi oleh DPR RI.....	66
4.3.	Upaya Diplomasi Yang Dilakukan Oleh Para Menteri	68
4.4.	Upaya Sosialisasi Dengan Mengkenalkan <i>Role Play</i> Sawit.....	72
BAB 5	KESIMPULAN.....	77
	DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pohon Industri Sawit dan Turunannya	29
Gambar 2.2 Peta Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2016 ..	32
Gambar 2.3 Ekspor Kelapa Sawit 2011-2017	40
Gambar 2.4 Provinsi Sentra Prod. Minyak Sawit di Indonesia, rata-rata 2012-2016....	42
Gambar 4.1 Bertemu PM Spanyol, Pres. Jokowi Minta Dukungan Kampanye Negatif pd. Sawit	63
Gambar 4.2 Diplomasi Sawit, Menko Maritim Kunjungi Brussel.....	68
Gambar 4.3 Konferensi <i>Eradicating Poverty Through The Agriculture and Plantation Industry to Empower Peace and Humanity</i> di Roma, Italia.....	70
Gambar 4.4 Menteri Luar Negeri RI dan Malaysia Tindaklanjuti Diplomasi Sawit.....	71



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Proyeksi Produksi Kelapa Sawit di Indonesia 2016-2020.....	44
Tabel 3.1 Perbandingan Harga <i>Rapeseed Oil</i> dengan <i>Palm Oil</i>	48
Tabel 4.1 Upaya Diplomasi Indonesia Dalam Menghadapi Kampanye Hitam Uni Eropa...	74



DAFTAR SINGKATAN

ABS	: <i>Acces and Benefit Sharing</i>
BKSAP	: Badan Kerjasama Antar Parlemen
BPDPKS	: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
CBD	: <i>Convention on Biological Diversity</i>
CBS	: <i>Cocoa Butter Substitute</i>
CITES	: <i>Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i>
CPKO	: <i>Crude Palm Kernel Oil</i>
CPO	: <i>Crude Palm Oil</i>
CSPO	: <i>Certified Sustainable Palm Oil</i>
GAPKI	: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
GKR	: Gas Rumah Kaca
GKSB	: Grup Kerja Sama Bilateral
IEU CEPA	: <i>Indonesia – European Union Partnership Agreement</i>
ISPO	: <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>
IUCN	: <i>Internationaal Union on Conservation Nature</i>
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NGO	: <i>Non Governmental Organization</i>
PKO	: <i>Palm Kernel Oil</i>
PKS	: Pabrik Kelapa Sawit
SISKA	: Sistem Integrasi Sapi – Kelapa Sawit
TBS	: Tandan Buah Segar
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ancaman terhadap ekspor minyak sawit Indonesia ke Eropa menjadi isu yang memanas saat ini. Resolusi sawit yang dikeluarkan oleh Parlemen Eropa sangat memberatkan bagi industri sawit yang ada di Indonesia. Padahal, segala macam upaya telah dilakukan oleh berbagai elemen mulai dari anggota DPR, hingga Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi. Hal ini dibenarkan ketika sang menteri menerima kunjungan dari Menteri Luar Negeri Italia Angelino Alfano di Gedung Pancasila. Pada pertemuan tersebut Menteri Retno Marsudi menjelaskan bahwa Italia merupakan salah satu mitra dagang terbesar yang menempati urutan ketiga di Uni Eropa. Kerja sama antara dua negara tersebut juga terus mengalami peningkatan. Pada pertemuan itu Indonesia meminta Italia untuk membantu menjembatani negosiasi Indonesia dengan Parlemen dan Komisi Eropa terkait Resolusi Sawit. Hal ini membuktikan bahwa komoditas minyak sawit memang sangat membantu sebagai pemasukan negara dan akan sangat disayangkan apabila ekspor sawit terancam dengan adanya hambatan seperti ini (Maulana, 2018).

Tanaman sawit bukan tanaman asli Indonesia, akan tetapi, komoditi jenis ini menjadi primadona di Indonesia. Menurut sejarah, kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) telah berkembang sangat pesat di kawasan Asia Tenggara.. Kelapa sawit hadir di Indonesia bermula pada tahun 1948 yang berasal dari Bourbon (Mauritius) dan Amsterdam. Bibit sawit pertama kali ditanam di Kebun Raya Bogor, kemudian disebarkan ke pulau Sumatra. Hingga saat ini banyak daerah di Sumatra, Kalimantan dan beberapa daerah lain yang mengandalkan sawit sebagai komoditinya, kebanyakan lahan sawit terdapat di Pulau Kalimantan, Sumatra kemudian sebagian kecil juga di Pulau Jawa, Sulawesi dan Papua (Suyatno, 1994).

Ekspor sawit Indonesia cukup menjanjikan, ini dibuktikan dengan peningkatan angka permintaan produksi setiap tahunnya, dan secara global, dari tahun ke tahun perkembangan produksi sawit di dunia terus mengalami peningkatan. Total angka produksi Indonesia pada tahun 2015 adalah 6.214.003 ton kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 6.645.876 ton dan diperhitungkan meningkat lagi pada tahun 2017 menjadi 7.071.877 ton (Kementerian Pertanian, 2016). Dari beberapa fakta diatas, minyak sawit memiliki tren positif dalam peningkatan jumlah produksinya.

Proyeksi pasokan minyak sawit dunia dipastikan akan terus meningkat setiap tahunnya. Konsumsi pada tahun 2020, dunia akan mencapai 58.639 ribu ton dan produksi akan mencapai 59.264 ribu ton dan perdagangan dunia akan mencapai 441.649 ribu ton. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa minyak sawit beserta produk turunannya sangat dibutuhkan dan kebutuhannya selalu bertambah setiap waktunya. Hal itu yang memaksa produksi dan lahan sawit harus ditambah agar dapat memenuhi kebutuhan dunia (World Growth, 2011:15).

Keberadaan sawit di Indonesia sangat krusial. Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (2017). Sawit menjadi penting bagi Indonesia, dikarenakan sawit merupakan penyumbang devisa terbesar hingga saat ini. Hal itu dibuktikan dengan sumbangsuhnya sebesar 17, 8 miliar Dollar Amerika Serikat pada tahun 2016. Sawit juga menjadi sebuah komoditi utama yang menempati urutan paling atas selama lebih dari 10 tahun. Maka tidak heran jika sawit menjadi komoditi andalan bagi Indonesia.

Meskipun sawit menjadi komoditas ekspor penting bagi negara, bukan berarti tanpa masalah. Beberapa pihak menganggap bahwa terdapat banyak dampak negatif yang diakibatkan oleh sawit sehingga menimbulkan kritik dari dalam maupun luar negeri terkait isu deforestasi, dan alih fungsi lahan. Kejadian ini yang membuat aktivis lingkungan merasa perlu untuk mengkritisi sawit Indonesia, karena alih fungsi lahan dianggap sebagai hal yang merugikan bagi lingkungan (Paoli, 2013).

Kritik tajam diberikan kepada industri sawit karena mereka banyak melakukan hal-hal yang merugikan lingkungan. Penggundulan hutan, khususnya konversi lahan menjadi perkebunan sawit dianggap sebagai hal yang sangat terasa dampaknya terhadap lingkungan. Indonesia menjadi perhatian banyak pihak seperti Greenpeace, WWF, Friends of Earth. Isu habitat orang utan terancam dan emisi CO₂ tidak luput dari sorotan Organisasi-organisasi tersebut. Pihak-pihak yang peduli akan lingkungan pada dasarnya menyayangkan apabila sampai merusak alam. Oleh karena itu tidak heran jika Indonesia menjadi sorotan pihak-pihak yang peduli atau aktivis lingkungan karena efek dari merebaknya lahan sawit sangat terasa dan merusak tatanan alam yang ada (WorldGrowth, 2011:16)

Greenpeace menjadi salah satu organisasi yang mengatasnamakan lingkungan yang paling getol dalam menghadapi perusahaan sawit. Asia Pulp & Paper dan Sinar Mas memiliki lahan sawit terbesar di Indonesia. Kedua perusahaan ini menjadi sorotan *Greenpeace* terkait perusakan hutan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem yang ada. Oleh karena itu rapor merah diberikan oleh *Greenpeace* pada kedua perusahaan ini. Walaupun kedua perusahaan ini sempat melakukan itikad baik dalam menghentikan deforestasi, namun nyatanya bukti baru menunjukkan bahwa kedua perusahaan ini masih tidak serius dalam penghentian deforestasi dan alih fungsi lahan (Greenpeace, 2018).

Eropa merupakan salah satu tujuan ekspor Indonesia yang paling besar dan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat ekspor minyak sawit ke Eropa mengalami kenaikan sebanyak 27 persen atau 352.020 ton di bulan Februari 2017. Ekspor kembali meningkat menjadi 446.920 ribu ton pada bulan Maret 2017 (Candra, 2017). Dari waktu ke waktu jumlah ekspor Minyak sawit ke negara-negara Eropa semakin meningkat. Tren positif minyak sawit terus berlanjut di Benua Eropa. Bukti lain yang menggambarkan tren positif dari ekspor sawit ke Eropa yaitu pada semester pertama tahun 2017 mencapai 2,7 juta ton yang berarti naik sekitar 42% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu sebesar 1,9 juta ton (Okezone, 2017). Dengan jumlah sebesar itu Indonesia menjadi negara yang menempati posisi teratas

pasar Eropa adalah hal ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO), Palm Kernel Oil (PKO) dan turunannya.

Indonesia memproduksi minyak sawit sebesar 32,5 juta ton pada tahun 2016 kemudian naik menjadi 38 juta ton pada 2017. Perjalanan jumlah ekspor minyak sawit Indonesia pada tahun 2016 sebesar 23 juta ton, 2017 sebesar 29 ton, kemudian proyeksi pada 2018 ialah sebesar 31 juta ton. Kenaikan angka pada tahun 2018 terbilang kecil dibandingkan dengan kenaikan dari tahun 2016 ke 2017. Hal tersebut terjadi karena terdapat hambatan-hambatan yang secara langsung maupun tak langsung menghambat perjalanan komoditi sawit Indonesia. maka dari itu hal ini tidak boleh terus menerus terjadi. Hal ini diakibatkan tren produksi hingga ekspor positif, bisa berubah karena hambatan-hambatan yang dilakukan oleh pihak Eropa (Setiawan, 2018).

Kebijakan yang dibuat Uni Eropa yaitu Resolusi Sawit sangat disayangkan oleh negara eksportir, terutama Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam kebijakan tersebut terdapat berbagai hambatan yang memberatkan bagi kegiatan ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa. Parlemen Uni Eropa mengeluarkan Resolusi Sawit dan melarang biodiesel berbasis kelapa sawit. Alasan yang melatar belakungnya ialah deforestasi dan eksploitasi pekerja anak kemudian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Merupakan alasan yang biasa dilayangkan ketika berbicara tentang minyak sawit (Sukmana, 2017). Tahun 2017, untuk sekian kalinya Uni Eropa melancarkan ancamannya terhadap minyak sawit Indonesia tepatnya pada tanggal 17 Maret. Isinya yaitu merekomendasikan kebijakan baru dalam hal pembatasan impor minyak sawit dan penghentian penggunaan minyak sawit untuk program biodiesel Eropa. Usulan kebijakan itu kemudian diputuskan dalam pleno Parlemen Eropa pada 3 April hingga 6 April 2017 yang kemudian merekomendasikan Badan Eksekutif Uni Eropa untuk mengeksekusi. Hal ini yang selanjutnya mengakibatkan kegaduhan di sektor sawit (GAPKI, 2017). Dengan demikian, berbagai respon mulai muncul dikarenakan kebijakan seperti ini dinilai cukup memberatkan, terlebih lagi bagi negara eksportir terbesar, yakni Indonesia.

Kebijakan berupa Resolusi Sawit ternyata bukan satu-satunya bentuk Uni Eropa menentang minyak sawit. Saat ini di berbagai negara bagian sudah banyak terdapat label *No Palm Oil*, yang mengartikan bahwa produk tersebut tidak menggunakan minyak yang terbuat dari kelapa sawit. Hal ini adalah bentuk atau bukti bahwa produk-produk di Negara Eropa sudah mulai melabeli kemasannya menggunakan label *No Palm Oil*. Hal-hal kecil seperti ini merupakan suatu bentuk kampanye penolakan terhadap minyak sawit yang mana seakan-akan minyak sawit adalah komoditi yang merugikan (Widjaja, 2017:8).

Dengan cepat, Indonesia sigap merespon kebijakan Resolusi sawit. Indonesia sudah melakukan berbagai cara untuk bisa meredam kebijakan tersebut. Pada pertemuan G20 di Jerman pada bulan Juli 2017 lalu. Presiden Jokowi menyampaikan kepada seluruh perwakilan negara yang hadir untuk terus meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi. Tidak lupa juga Presiden Jokowi juga memanfaatkan forum untuk menyinggung diplomasi sawit, khususnya dilayangkan untuk negara-negara Eropa yang melakukan kampanye hitam terhadap sawit Indonesia. Kampanye hitam merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh Indonesia untuk menggambarkan tindakan-tindakan Uni Eropa dalam membatasi ekspor sawit masuk ke negara-negara Eropa. Sikap-sikap yang dilakukan oleh Indonesia menunjukkan bahwa ekspor minyak sawit ke negara-negara Eropa menjadi fokus permasalahan ekonomi bagi Indonesia, terlebih lagi Presiden Jokowi merasa perlu untuk meningkatkan perekonomian, bukan malah menghambat perekonomian (Laucereno, 2017).

Menengok ke masa lalu, pada hakikatnya permasalahan ini bukan merupakan hal yang baru terjadi. Sebelum masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo juga sudah ramai diperbincangkan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu menganggap bahwa dibalik isu anti-sawit ini, pada hakikatnya terdapat persoalan persaingan dagang. Hal ini karena minyak jagung, minyak biji bunga matahari, minyak kedelai yang notabene adalah produk barat menjadi tertekan persaingannya. Melihat pada masa kepemimpinan sebelumnya bahwa isu sawit memang bukan hal baru dan memang sudah cukup lama tiada hentinya diperbincangkan (Ariefyanto, 2012).

Prosesi-prosesi *lobbying* atau diplomasi sudah kerap kali dilakukan. Pada Bulan September 2017. Delegasi Indonesia mengunjungi markas besar Komisi Eropa di Brussels, Belgia. (Kementerian Luar Negeri, 2017). Hal ini merupakan proses atau salah satu usaha Indonesia untuk memperbaiki keadaan yang ada terkait perdagangan sawit di Eropa. Karena sejatinya proses diplomasi membutuhkan waktu yang tidak singkat, oleh karena itu Indonesia masih terus melancarkan serangkaian upaya dalam meredam kebijakan resolusi sawit yang memberatkan.

Usaha-usaha sudah dilakukan oleh pihak Indonesia terkait Resolusi Sawit oleh Parlemen Eropa. Indonesia merespon dengan melakukan serangkaian diplomasi mulai dari Presiden, Menteri, Anggota DPR hingga akademisi. Kemudian banyak pendapat yang muncul, salah satunya yaitu dari Menteri Perdagangan yang menyebutkan bahwa terdapat kepentingan bisnis terkait keputusan yang diambil oleh Parlemen Eropa. Kepentingan bisnis yang dimaksud yaitu berkaitan dengan minyak produksi yang berasal dari Eropa tidak dipermasalahkan keberadaannya. Justru yang berasal dari luar Eropa yang dipermasalahkan (Ardhian, 2017). Salah satunya yaitu Indonesia yang merupakan penghasil sawit terbesar di dunia sekaligus pengeksport terbesar ke Benua Biru tersebut. Menteri Perdagangan menilai bahwa hal tersebut merupakan kepentingan bisnis yang seakan menambahkan keyakinan bahwa Eropa mempermasalahkan masalah ekonomi atau bisnis, bukan lingkungan.

Mendekati akhir tahun 2017, tepatnya pada bulan November 2017, proses *lobbying* terus dilakukan oleh Indonesia. Indonesia mengirimkan delegasi yang terdiri dari 16 anggota DPR RI Komisi IV, di dampingi oleh wakil dari Kementerian Pertanian, staf ahli Kementerian Lingkungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan dan Hutan. Pada Prosesi ini disampaikan bahwa betapa pentingnya Sawit bagi Indonesia. 41 persen lahan sawit dikelola oleh petani kecil (Prabowo, 2017). Data tersebut membuktikan bahwa pendapatan petani akan terganggu jika Resolusi Sawit benar-benar diimplementasikan. Indonesia benar-benar akan terancam kesejahteraannya bahkan dari elemen yang paling bawah, yakni petani.

Perlawanan berupa upaya-upaya Indonesia untuk merespon resolusi sawit di Uni Eropa bermunculan. Sebagai pemasok terbesar minyak sawit di Uni Eropa, permasalahan seperti ini sangat mengganggu dan merugikan Indonesia. Pada pertemuan Ulasan Kebijakan Perdagangan (*Trade Policy Review/TPR*) ke-13 terhadap Uni Eropa di *World Trade Organization (WTO)* Delegasi Indonesia menyampaikan keprihatinan terhadap Resolusi Sawit dan Deforestasi (*Resolution on Pal Oil and Deforestation of Rainforest*) yang disetujui oleh Parlemen Eropa pada bulan April 2017 yang sudah jelas-jelas akan menyebabkan diskriminasi terhadap produk-produk minyak sawit (Zuraya, 2017). Dengan demikian, Indonesia memang membutuhkan langkah yang tegas dan penanganan yang serius terkait kampanye hitam ini, agar perdagangan Minyak sawit bisa terus menjadi primadona pendapatan Indonesia.

Pada awal tahun 2018 Indonesia masih gencar melakukan serangkaian upaya dalam rangka merespon kebijakan Resolusi Sawit. Dialog berkesinambungan, konstruktif, dan paralel bersama tiga institusi Uni Eropa yaitu Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan Dewan Eropa. KBRI Brussel melakukan kerjasama dengan kedubes negara-negara produsen sawit seperti Malaysia, Thailand, Brazil, Ekuador, Guetamala, Honduras, Kolombia, Ghana, Nigeria, dan Kenya. Dengan dukungan dari berbagai pihak seperti negara, diharapkan mampu untuk berkerja sama untuk meluluhkan Parlemen Eropa dalam hal Resolusi Sawit. Untuk itu kerjasama ini dilakukan atas dasar kesamaan latar belakang negara yang memiliki komoditi pengekspor sawit ke Uni Eropa (Regina, 2018).

Namun pada kenyataannya, kabar mengenai kampanye negatif juga tiada hentinya diberitakan, hal tersebut memperpanjang sederet hambatan yang akan diterima Indonesia. Pada bulan April 2018 jaringan supermarket asal Inggris akan menghentikan penggunaan produk yang mengandung *Crude Palm Oil*. Hal ini semakin membuat sulit *Crude Palm Oil* Indonesia yang mana kemudian pihak dari Indonesia melayangkan protes karena dianggap merugikan. Besar kemungkinan jika hambatan-hambatan yang lain akan menyusul untuk menghambat masuknya minyak sawit Indonesia ke Eropa. Maka dari itu jalan diplomasi Indonesia masih panjang, butuh waktu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Disamping

hambatan semakin banyak, sudah seharusnya diplomasi dimasifkan. Upaya-upaya terus dilakukan, hambatan juga kian terus berdatangan (Kontan, 2018).

Berangkat dari latar belakang dan fakta-fakta diatas, dimana Indonesia bertumpu dan berharap banyak terhadap Minyak Kelapa Sawit maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian ilmiah dengan judul:

**“Respon Indonesia Terhadap “Kampanye Hitam” Ekspor Sawit
oleh Uni Eropa”**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian ilmiah, terdapat tiga bentuk perumusan masalah, pertama, secara diskusi yang mana pada awalnya terdapat deskripsi fakta-fakta yang ada, kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan. Kedua, secara proporsional yaitu hubungan antara faktor-faktor yang logis yang disajikan secara deskriptif atau langsung kepada pertanyaan-pertanyaan penelitian. Ketiga, secara gabungan yang sekaligus dipilih penulis dalam penelitian ini yang pada awalnya akan disajikan secara diskusi kemudian dijelaskan secara proporsional dan diakhiri dengan sebuah pertanyaan (Moelong, 2012).

Perjuangan Indonesia dalam menghadapi kampanye hitam kebijakan sawit seakan tiada akhir. Hal ini dimulai saat kebijakan sawit disahkan oleh parlemen Eropa, hingga pada tahun 2018, Indonesia sudah meluncurkan serangkaian upaya negosiasi dan diplomasi berupa kunjungan dalam acara kenegaraan. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia sangat serius dan merasa sangat dirugikan ketika kebijakan ini berlangsung. Ekspor CPO Indonesia akan mengalami gangguan atau hambatan dengan adanya kebijakan ini.

Diplomasi Ekonomi, sebuah kata kunci yang harus benar-benar dikaji, dipersiapkan, dan dilaksanakan dengan baik. Diplomasi ekonomi seakan menjadi sebuah kewajiban bersama jika Indonesia menginginkan ekspor CPO tetap dalam koridor aman. Pada hakikatnya industri sawit Indonesia sudah semakin membaik dibuktikan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari komoditi sawit menjadi yang pertama dalam jajaran komoditi-komoditi lain. Proyeksi untuk kedepannya sudah semakin jelas bahwa minyak sawit merupakan komoditi yang menjanjikan akan keuntungan yang besar. Oleh karena itu sangat disayangkan jika ekspor ke luar

khususnya ke negara-negara Eropa mengalami gangguan terlebih lagi sebuah hambatan yang sangat terasa dampaknya, untuk itu muncul suatu upaya-upaya untuk melawan.

Namun demikian dari serangkaian upaya-upaya yang sudah dilakukan Indonesia secara berkala, Uni Eropa tetap pada sikapnya untuk tetap melakukan implementasi Resolusi Sawit walaupun upaya perbaikan kualitas sawit terus dilakukan oleh Indonesia. Kemudian suatu tindakan yang paling cocok untuk kondisi sekarang yakni melakukan diplomasi, walaupun diplomasi memang membutuhkan waktu yang tidak singkat. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang ada pada latar belakang, peneliti merumuskan sebuah rumusan masalah yakni:

“Bagaimana Respon Indonesia dalam menghadapi “kampanye hitam” Uni Eropa terhadap ekspor sawit Indonesia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya, tujuan penelitian adalah suatu upaya untuk memecahkan masalah. Hal ini dirasa keliru jika menyamakan masalah dengan penelitian. Pengumpulan data hingga memahami sekaligus menjelaskan faktor-faktor apa saja yang berkaitan dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah suatu hal yang harus dicantumkan. Prosesi-prosesi yang ada merupakan sebuah dialektik yang berperan sebagai proposisi terikat dan sintesis yang membentuk permasalahan berdasarkan usaha sintesis tertentu (Moelong, 2012).

Karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana respon Indonesia dalam meredam kampanye hitam Uni Eropa. Serangkaian upaya sudah dilakukan, namun kampanye-kampanye hitam masih terus berlangsung. Jadi hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk meneliti.

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan tentu menjadi hal yang penting dalam sebuah penelitian ilmiah. Berfungsi sebagai pembatas agar penulis bisa tetap berjalan lurus tanpa melewati batas-batas ruang lingkup yang sudah ditentukan.

1.4.1 Batasan Materi

Batasan materi digunakan agar penulis dapat fokus terhadap materi yang akan dibahas. Dalam karya ilmiah ini, penulis akan fokus membahas tentang bagaimana respon Indonesia menghadapi kampanye hitam yang dilakukan Uni Eropa.

1.4.2 Batasan Waktu

Batasan waktu berguna untuk memperjelas penulis dalam menganalisa karya tulis ilmiahnya. Dalam Penelitian ini penulis mengkaji permasalahan mulai dari tahun 2011 yang mana *EU Renewable Energy Directive* mulai diberlakukan hingga tahun 2018 penulisan karya ilmiah ini ditulis, dimana respon dan upaya-upaya diplomasi masih berlangsung untuk melawan hambatan-hambatan ekonomi yang ada di Uni Eropa.

1.5 Kerangka Konseptual

Suatu negara akan bereaksi atau merespon terhadap tindakan yang dilakukan oleh negara lain apabila menyentuh kepentingan nasionalnya. Pada tingkat internasional, respon tersebut biasanya diwujudkan atau disalurkan melalui mekanisme diplomasi baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Hal ini yang dilakukan Indonesia dalam merespon kampanye hitam oleh Uni Eropa terhadap ekspor sawit Indonesia. Pada sub bab ini menjelaskan tentang konsep diplomasi ekonomi yang dipilih untuk menganalisis permasalahan. Dimulai dengan pengertian diplomasi, pengertian diplomasi ekonomi dari berbagai akademisi hingga masuk kepada konsep diplomasi ekonomi yang digunakan.

1.5.1 Konsep Diplomasi Ekonomi

Diplomasi digunakan sebagai cara yang ampuh dalam menyelesaikan konflik, negosiasi dan menemukan solusi yang saling menguntungkan. Sebelum beranjak pada pengertian diplomasi ekonomi, berikut akan dijelaskan terkait definisi dari diplomasi. Pertama yaitu pemikiran dari Satow, diplomasi digunakan sebagai aplikasi Intelijen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara

pemerintahan yang berdaulat, yang kadangkala diperluas dengan hubungan dengan negara-negara jajahannya (Satow, 1922).

Barston (1997) mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan antara negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan Internasional lainnya. Melalui perwakilannya, negara sekaligus bersama aktor-aktor lain berusaha menyampaikan kepentingan nasionalnya secara luas maupun secara khusus. Penyampaian ini dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, *lobby*, maupun kunjungan.

Berikut pengertian lengkap diplomasi menurut *Deluxe Black Law Dictionary*:

“The art and practice of conducting negotiations between foreign governments for the attainment of mutually satisfactory political relations. Negotiation or intercourse between nations through their representatives. The rules, customs, and privileges of representatives at foreign court”(Black, 1990:459).

Definisi lain dari diplomasi menurut *Dictionary of Diplomacy* yakni penempatan wakil suatu negara pada organisasi internasional. Berikut pengertian lengkap diplomasi menurut *A Dictionary of Diplomacy*:

“The conduct of relations between sovereign states through the medium of officials based at home or abroad, the latter being either members of their state’s diplomatic service or temporary diplomats. Thus diplomacy includes the stationing of representatives at International Organizations”.(Berridges & James, 2004:69-70)

Dari beberapa definisi yang sudah dikemukakan diatas, metode dan isi yang dianggap penulis paling cocok dengan permasalahan ialah “Diplomasi mewakili tekanan politik, ekonomi dan militer kepada negara-negara yang terlibat dalam aktivitas diplomasi, yang diformulasikan dalam pertukaran permintaan dan konsesi antara para pelaku negosiasi”. Demi mencapai kepentingan nasionalnya keterampilan dalam hal diplomasi sangat dibutuhkan untuk mensukseskan tujuan-tujuan dari pencapaian kepentingan nasional. Karena pada dasarnya seorang diplomat diwajibkan untuk mencapai sebuah kesepakatan, kompromi, hingga penyelesaian sebuah konflik dimana pada mulanya tujuan-tujuan pemerintah saling bertolak belakang. Diplomasi dapat dilakukan di berbagai tempat seperti pertemuan khusus atau konferensi umum. Diplomasi diharapkan dapat merubah sebuah

kebijakan, tindakan, tujuan, dan sikap pemerintahan negara lain. Diplomat memiliki tugas yang berat untuk dapat melancarkan persuasi, menawarkan penghargaan, mempertukarkan konsesi hingga mengirimkan suatu ancaman (Djelantik, 2008).

Diplomasi dan kebijakan luar negeri memiliki kaitan yang sangat erat, karena diplomasi mencerminkan kebijakan luar negeri suatu negara. Pada umumnya suatu kebijakan luar negeri dirumuskan oleh seorang Menteri luar Negeri dan staf Departemen Luar Negeri. Tentunya dilakukan oleh ahli-ahli yang sangat terlatih dalam hal perundingan. Untuk pelaksanaannya sendiri para perwakilan negara ini ditepatkan di luar negeri dan di dalam organisasi-organisasi Internasional. Dalam menjelaskan kaitan antara diplomasi dan kebijakan luar negeri dapat menggunakan teori sistem yang dikemukakan oleh Jervis. Menurutnya ketika sebuah sistem dibentuk oleh kenyataan, kemudian berubah di satu bagian, maka akan menyebabkan perubahan di bagian lain. Dalam hal ini ialah perubahan dalam kebijakan luar negeri akan berpengaruh terhadap praktik diplomasinya (Djelantik, 2008).

Tujuan diplomasi yakni mengejar kepentingan nasional dengan cara bertukar informasi dilakukan secara terus-menerus dengan negara lain ataupun rakyat di negara lain. Langkah-langkah persuasif antar negara bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku negara lawannya. Dapat diartikan bahwa diplomasi membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk dapat mencapai kepentingan dari setiap negara. Karena untuk menyetarakan kepentingan dalam artian saling menguntungkan dibutuhkan pengkajian dan negosiasi dalam kurun waktu yang cukup lama (Djelantik, 2008).

Diplomasi ekonomi dipilih sebagai kerangka pemikiran yang cocok dalam menganalisa penelitian ilmiah ini. Diplomasi ekonomi dianggap mampu menjawab rumusan masalah yang dibuat oleh penulis sehingga dapat dengan jelas memaparkan analisa dari permasalahan yang ada. Definisi diplomasi ekonomi menurut *Dictionary Diplomacy* yakni berfokus terhadap suatu kebijakan ekonomi yang dipertanyakan. Perpaduan antara kata diplomasi dan kata ekonomi akan menuntun pada negosiasi bertemakan ekonomi. Lembaga *World Trade Organization* (WTO) merupakan suatu badan yang tentunya menjadi kiblat dari isu-

isu perdagangan yang ada di dunia. WTO juga memantau terkait berjalannya diplomasi ekonomi dari berbagai negara.

Berikut merupakan pengertian diplomasi ekonomi secara lengkap menurut *Dictionary Diplomacy*:

“(1) Diplomacy concerned with economic policy questions, including the work of delegations to conferences sponsored by bodies such as the World Trade Organization. While distinct from the commercial diplomacy of diplomatic missions, it also includes that part of their work concerned with monitoring and reporting on economic policies and developments in the receiving state and advising on how best to influence them. (2) Diplomacy which employs economic resources, either as rewards or sanctions, in pursuit of a particular foreign policy objective. This is sometimes known as ‘economic statecraft’ “ (Berridge & James, 2004:91).

Pada perkembangannya, peradaban dunia yang ada pada saat ini sudah mulai banyak berubah. Untuk mencapai kepentingan nasionalnya, negara tidak lagi menggunakan kekuatan militernya. Pendekatan dengan model tersebut sudah ketinggalan zaman, untuk saat ini dunia menggunakan *soft diplomacy*. *Soft power* dari suatu negara terletak pada sumber daya budaya, nilai-nilai, dan kebijakan yang dibuat. Menyinggung mengenai gagasan *soft power*, konteks tersebut mengarah pada kemampuan suatu negara dalam berdiplomasi atau tidak menggunakan armada militernya. Namun demikian bagi Indonesia sendiri *hard power* masih belum menjadi pilihan untuk digunakan, Indonesia lebih memilih menggunakan *soft power* (Sukma, 2008 : 10).

Pada awalnya, diplomasi hanya ada karena perang dan perdagangan saja. Namun demikian seiring berkembangnya zaman banyak sekali permasalahan yang harus diselesaikan dengan cara diplomasi, salah satunya adalah ekonomi dan politik. Akademisi seperti Jacob Viner, Albert O. Hirschman dan Quincy Wright merupakan peneliti yang fokus terhadap diplomasi ekonomi pada zaman *post-war*. Hans Morgenthau mendefinisikan bahwa diplomasi ekonomi merupakan sebuah diplomasi yang menggunakan instrumen ekonomi untuk mencapai kepentingan politik. Berikut merupakan pengertian lengkap yang dikemukakan oleh Hans Morgenthau:

“It is necessary to distinguish between, say, economic policies that are under-taken for their own sake and economic policies that are the instruments of a political policy—a policy, that is, whose economic purpose is but the means to the end of controlling the policies of another nation. The distinction is of great practical importance, and the failure to make it has led to much confusion in policy and public opinion” (Okano & Heijmans. 2013:20).

Dari waktu ke waktu, peneliti Hubungan Internasional dari Amerika Serikat dan Eropa mengembangkan konsep dan teori integrasi antara politik dan ekonomi dengan lebih tegas. Tahun 1970 dicatat sebagai tahun pertama masuk dalam ranah studi Ilmu Hubungan Internasional yang mana sudah banyak inovasi-inovasi pemikiran yang mengarah ke diplomasi ekonomi. Robert D. Putnam mempunyai konsep yaitu *“two-level games”* atau *“double-edge diplomacy”* yang berarti sebuah gabungan kekuatan nasional dan internasional dalam perundingan internasional, konsep ini banyak dikembangkan sejak tahun 1988 (Okano dan Heijmans, 2013:21).

Jan Tinbergen juga berpendapat tentang model gravitasi perdagangan yang mana model tersebut menjadi model ekonomi secara analisis empiris yang bermanfaat bagi perdagangan Internasional. Kemudian juga ada konsep dari Susan Strange yang mempunyai konsep *“triangular diplomacy”* yaitu negara-negara juga harus melakukan negosiasi dengan Perusahaan Asing dan Perusahaan Multinasional agar lebih bisa dipercaya (Okano & Heijmans, 2013:22). Dengan adanya dukungan tersebut akan lebih menguatkan dan menyukseskan diplomasi ekonomi.

Kemudian tokoh selanjutnya yakni David Baldwin yang juga berkontribusi dalam Ekonomi Politik Internasional tentang *economic statecraft* yang mana peran pemerintah dalam ekonomi sangat besar. Kemudian Solomon Polachek (2013) mengembangkan konsep *economic security*. Ia berargumen bahwa kenaikan dalam perdagangan dan investasi dapat mengurangi kemungkinan konflik. Perdebatan yang terjadi didalam *economic statecraft* dan *economic security* yang mana menjelaskan tentang tujuan-tujuan dari kebijakan dan proses negosiasi, pada kenyataannya tidak dapat menjelaskan atau berkontribusi banyak dalam memecahkan masalah yang ada. Jadi Susan Strange, David Baldwin dan Solomon

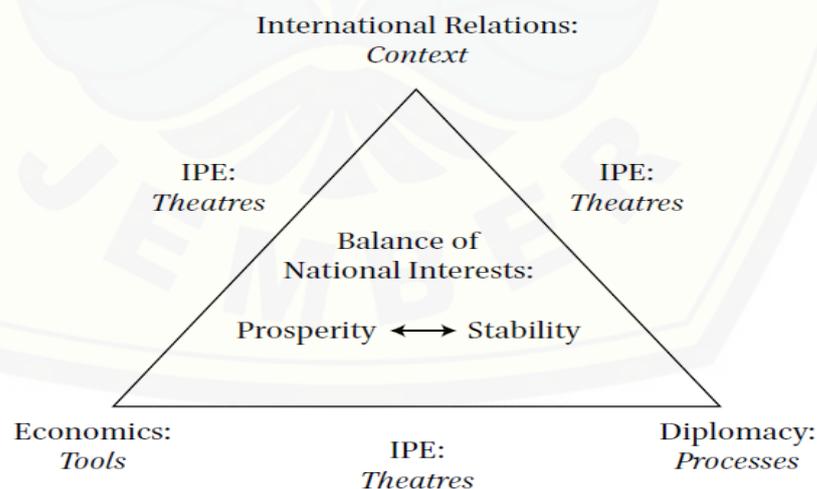
Polachek tidak cukup baik dalam membuat konsep ini. Namun demikian terdapat F. Blanchard dan M. Ripsman yang mengembangkan konsep tersebut. Konsepnya lebih memperhatikan pentingnya pengaturan politik domestik yang berasal dari negara pengirim dan menurunkan biaya politik terhadap negara tujuan. Sedangkan Van Bergeijk menghasilkan ulasan terperinci dari berbagai model konsep dan menguji manfaat dari keterlibatan aktif di dunia perdagangan Internasional. (Okano & Heijmans, 2013:23). Diplomasi ekonomi memang mengalami banyak perubahan dengan berkembangnya zaman. Hal ini didukung dengan semakin banyaknya akademisi yang terus mengembangkannya.

Diplomasi ekonomi bersifat siklis artinya harus menunggu bahwa pemerintah di tingkat nasional meluncurkan inisiatif berupa kebijakan, kemudian diplomasi ekonomi dapat dilangsungkan. Namun pada saat ini pemerintah dalam suatu negara cenderung menggunakan alat ekonomi dalam mengejar kepentingan kebijakan luar Negeri saat legitimasi dan kekuasaan struktur kerja sama Internasional menurun. Tiga faktor yang harus dipahami dalam menghubungkan antara ekonomi dan keamanan yaitu distribusi material Internasional, lingkungan Internasional yang strategis, posisi suatu negara dalam persaingan Ekonomi Internasional (Okano & Heijmans, 2013:24). Hal tersebut mengartikan bahwa sebuah negara harus memiliki kualitas distribusi yang baik ketika melakukan ekspor maupun impor. Kemudian dalam prosesnya distribusinya harus mempunyai jalur transportasi yang strategis untuk memudahkan pengiriman. Kemudian yang terakhir yakni terkait posisi atau *power* negara harus kuat dalam dinamika ekonomi Internasional.

Okano dan Heijmans (2013:27) berpendapat bahwa melalui diplomasi, pemerintah mencoba mendamaikan 3 jenis ketegangan yakni, ketegangan antara politik dan ekonomi, ketegangan antara tekanan Internasional dan domestik, ketegangan antara pemerintah dan pelakunya seperti bisnis swasta dan LSM. Diplomasi ekonomi tidak dapat dipisahkan dari konteks domestik (baik negara pengirim maupun negara penerima) dan kegiatan negara dipengaruhi oleh pelaku lain, seperti usaha swasta dan kelompok kepentingan lain.

Negara bukan satu-satunya pemain dalam ekonomi politik Internasional, terlebih lagi dalam membantu suksesnya diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi didefinisikan sebagai pengejaran keamanan ekonomi dalam sistem anarkis. Ekonomi keamanan yang dimaksud terdiri dari kemakmuran ekonomi dan stabilitas politik sebuah negara. Diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah mempunyai dua sifat yang saling berkaitan, yakni ekonomi dan politik yang artinya diplomasi ekonomi melibatkan “*bussiness end*” dan “*power-play end*”. Menurut Thomas Berger, kekuatan ekonomi adalah salah satu sumber dasar dan penting dari *soft power* namun juga sebagai pendukung kekuatan militer yang mana juga merupakan *hard power* (Okano & Heijmans, 2013:27-28).

Terdapat beberapa jenis aktivitas ekonomi Internasional yang ada, contohnya *commercial diplomacy*, *trade diplomasi*, *financial diplomasi*, *inducements*, *sanctions*. Pada karya ilmiah ini berfokus atau cocok dengan *trade diplomacy* yang memiliki beberapa fokus lebih mengerucut yaitu *bilateral FTAs*, *EPAs*, *(anti-dumping) tarrifs*, *export or import licenses*, *import or export quotas*, *trade and investment barriers*. Kemudian permasalahan dari judul yang penulis angkat lebih berfokus dan cocok terhadap konsep dari Okano & Heijmans yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kompilasi Okane dan Heijmans
(Sumber: Okano & Heijmans, 2013)

Empat elemen penting dari diplomasi ekonomi adalah *the context*, *tools*, *theatres*, dan *process*. Empat elemen diatas dapat menguraikan dan menganalisis tentang pemahaman yang lengkap ekonomi suatu negara. Diplomasi ekonomi dianggap sebagai sebuah usaha untuk mencari keseimbangan kepentingan nasional. Gambar diatas memiliki arti bahwa keempat elemen dan ketiga sudutnya merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dan saling bergantung satu sama lain. Model seperti gambar tersebut dianggap dapat membantu sebuah pemerintahan atau negara melalui instrumen-instrumennya untuk dapat menghasilkan keinginan atau kepentingan nasional yang hendak dicapai yang merupakan cerminan dari kepentingan nasional dalam negerinya. Dimana kesejahteraan dan stabilitas negara harus tetap dijaga agar seimbang. Hal itu yang terlihat di dalam segitiga (Okano & Heijmans, 2013:34).

Berikut merupakan penjabaran dari empat elemen diplomasi ekonomi:

1. *International Relations* sebagai *Context*, adalah bagaimana negara menyesuaikan kepentingan nasionalnya terhadap kondisi perekonomian Global. Dalam arti lain negara harus fokus memprioritaskan sekaligus menyamakan antara prioritas dalam negeri dan luar negeri.
2. *Economics* sebagai *Tools*, merupakan suatu kepanjangan tangan negara dalam merepresentasikan tujuan diplomasi ekonominya. Contoh: Kedutaan Besar Republik Indonesia, diplomat, *lobby groups* dan lain-lain.
3. *International Political Economy* sebagai *Theatres*, tempat, wadah atau arena dimana *state* memperjuangkan diplomasinya. Contoh: forum-forum Internasional, *The Group of Twenty Summit*, *World Trade Organization* dan lain-lain.
4. *Diplomacy* sebagai *Process*, merupakan proses jalannya diplomasi yang harus dilakukan secara baik. Mengajak aktor lain untuk memperkuat tujuan contohnya pihak industri, *Non Governmental Organization*, *corporate group* serta swasta. Dalam proses diplomasi harus ada kesinambungan antara pemerintah dan swasta.

Lensa ataupun konsep yang digunakan ini saling terkait, dan saling melengkapi. Hal ini menyiratkan bahwa diplomasi ekonomi akan efektif bila dapat memenuhi keempat konsep tersebut, yang mana dapat menimbulkan pertanyaan, 'konten' (konteks), 'siapa' (sarana), 'dimana' (panggung) dan 'bagaimana' (proses).

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana untuk melakukan analisis menggunakan perspektif ini. Konsep yang dikemukakan oleh Okano dan Heijmans dianggap konsep yang paling cocok dalam menganalisa rumusan masalah pada karya ilmiah ini. Dimana dalam mengupayakan atau melakukan diplomasi harus mencakup *context*, *tools*, *theatres*, dan *process*. Kemudian akan dianalisis apakah diplomasi ekonomi yang sudah dilakukan oleh Indonesia sudah mencakup empat elemen ataupun empat syarat yang sudah dikemukakan oleh Okano dan Heijmans (2013:34-36). Jika sudah, harus ditelisik lebih dalam lagi apakah sudah dilakukan dengan baik dan benar.

Kendati demikian, disamping adanya konsep diplomasi, Indonesia harus melihat apa saja yang sudah dilakukan negara-negara lain akan suksesnya diplomasi. Seperti yang dilakukan negara Georgia yang membuat *Guidebook* khusus untuk para diplomatnya dalam menjalankan diplomasi ekonomi. Hal ini memudahkan para utusan dalam melakukan negosiasi perihal ekonomi (Ministry of Foreign Affairs Georgia, 2014). Jepang juga melakukan hal yang sama. Terdapat *Diplomatic Bluebook* yang dibuat sebagai pedoman sekaligus jurus Jepang dalam berdiplomasi perihal ekonomi. Dalam buku pedoman tersebut dijelaskan mulai dari pesan dari Menteri Luar Negerinya, situasi internasional, kebijakan luar negeri Jepang, hingga kondisi diplomasi Jepang yang terbuka (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2017). Penting bagi Indonesia untuk melihat bagaimana kesuksesan negara lain yang sudah menjalankan diplomasi ekonomi. Demi tercapainya tujuan politik luar negeri, konsep diplomasi juga perlu melihat pengalaman negara lain dalam mensukseskan diplomasi.

1.5.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk membantu memperjelas bahwa tidak ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Pada sisi lain, penelitian sebelumnya juga tidak boleh diabaikan begitu saja. Karena penelitian sebelumnya juga berperan besar terhadap hasil penelitian selanjutnya. Penelitian atau karya ilmiah ini dinilai penting karena bertujuan untuk menganalisa diplomasi sawit Indonesia ke Uni Eropa, sehingga dapat kita ketahui bagaimana respon dan proses diplomasi sawit Indonesia dalam mensukseskan tujuan diplomasi ekonominya. Untuk itu tinjauan pustaka dilampirkan demi beberapa hal baik yang dapat mendukung penelitian-penelitian baru yang masih bertemakan sejenis (Usman, 2009).

Penelitian yang sejenis yakni skripsi dari Saqira Yunda Imansari (2015) yang menganalisa tentang kebijakan Indonesia dalam *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) pada tahun 2011. *Indonesian Sustainable Palm Oil* merupakan lembaga sertifikasi minyak sawit Indonesia. Sertifikasi yang dimaksud adalah berupa minyak sawit yang berlabel *sustainable development* atau minyak sawit yang berkelanjutan. Hal ini digunakan untuk mendukung Indonesia dalam hal ekspor. Negara-negara tujuan ekspor mulai mensyaratkan negara-negara eksportir sawit memiliki atau komoditi sawitnya sudah bersertifikasi ramah lingkungan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Indonesia menetapkan ISPO karena RSPO dirasa kurang menguntungkan bagi Indonesia sendiri.

Kemudian terdapat karya ilmiah dari Andi Alatas (2017) dengan judul “Trend Produksi dan Ekspor Minyak Sawit (CPO) Indonesia. Karya ilmiah ini menjelaskan bahwa Indonesia mempunyai trend produksi sawit yang sangat positif. Dalam artian peningkatan yang terus menerus terjadi pada produksi sawit Indonesia. Namun hal ini juga dibarengi dengan semakin merebaknya alih fungsi lahan yang semakin hari semakin bertambah. Penyebabnya adalah permintaan minyak sawit dalam hingga luar negeri yang semakin hari semakin bertambah menjadi penyebab terjadinya melonjaknya angka produksi. Hal ini merupakan berita baik bagi Indonesia karena sangat berdampak baik terhadap ekspor dan pemasukan yang besar bagi devisa negara.

Selanjutnya, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Juli Arianti, Riris Lawita Siahaan dan Lasmita Sihaloho (2017) dengan judul Pengaruh Ekspor Minyak Kelapa Sawit / *Crude Palm Oil* (CPO) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Pasca Reformasi (1998-2015). Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai ekspor yang dimiliki Indonesia, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi Indonesia (PDB). Jadi melihat potensi sawit yang ada, diharapkan pemerintah memiliki inisiatif untuk memberikan insentif kepada perusahaan hilir sawit untuk dapat mengembangkan industrinya khususnya mengembangkan produk turunannya. Hal ini dapat menjadi nilai tambah yang sangat efektif ataupun sangat besar bila industri memanfaatkan produk turunan, karena nilai jualnya pun lebih besar dibandingkan minyak mentah sawit.

Penelitian lain dari Widyastutik dan Ahmad Zaenal Ashiqin (2011 : 69-70) yang berjudul Analisis Daya Saing dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ekspor CPO Indonesia ke China, Malaysia, dan Singapura dalam Skema Asean-China Free Trade Agreement, Indonesia unggul. Hasil estimasi RCA atau *Revealed Comparative Advantage* menunjukkan bahwa secara umum komoditi CPO Indonesia di pasar China, Malaysia, dan Singapura memiliki keunggulan komparatif yang tinggi, dibuktikan dengan nilai RCA lebih dari 1.

Kemudian pada tahun (2017) Yeni Nuraeni juga meneliti Ekspor sawit. Penelitiannya berjudul Kinerja Ekspor Minyak Kelapa Sawit di Indonesia tahun 1985-2015. Pada penelitian ini Yeni menggunakan pendekatan kuantitatif dalam menganalisis kinerja ekspor CPO Indonesia. Menggunakan RCA, CMS, ECM sebagai perspektif pada karya ilmiah ini.

Karya ilmiah yang bertemakan minyak kelapa sawit memang tidak sedikit, namun penulis menganggap bahwa fokus yang dipilih terkait diplomasi sawit memiliki keunikan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Permasalahan yang dibahas sangat penting dikarenakan menyangkut ancaman pemasukan Indonesia melalui ekspor sawit. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sawit memiliki peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Dengan adanya berbagai kampanye hitam oleh berbagai pihak, terutama di Uni Eropa, Indonesia melakukan serangkaian diplomasi ekonomi untuk merespon permasalahan. Hal ini yang akan dianalisa oleh

penulis, yaitu perihal bagaimana proses diplomasi ekonomi Indonesia terhadap kampanye hitam yang dilakukan Uni Eropa. Hal tersebut dianggap menarik dan berbeda dengan penelitian sebelumnya, kendati demikian penelitian ini juga bertujuan untuk melengkapi penelitian terdahulu terkait permasalahan sawit Indonesia.

1.6 Argumen Utama

Argumen utama berfungsi sebagai jawaban sementara untuk rumusan masalah yang ada. Argumen utama berdasar pada latar belakang dan konsep yang dijadikan alat untuk menganalisis masalah penelitian.

Respon Indonesia terkait “kampanye hitam” yang berujung disahkannya kebijakan Resolusi Sawit ialah dilakukannya beberapa upaya diplomasi. Diplomasi yang dilakukan berbagai pihak Indonesia sebenarnya sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada konsep diplomasi ekonomi yang dipilih penulis. Terdapat beberapa bentuk diplomasi seperti kunjungan kenegaraan, diplomasi oleh Presiden, diplomasi oleh DPR, Menteri, hingga akademisi yang mengenalkan *role play* sawit. Namun dukungan belum ada dari pihak Lembaga Swadaya Masyarakat: Greenpeace. Oleh karena itu kampanye hitam masih terus berlangsung dan Resolusi Sawit akan tetap di implementasikan.

1.7 Metode Penelitian

Dalam karya ilmiah, metode penelitian merupakan aspek estimologis yang penting. Metode penelitian pada karya ilmiah ini mencakup unit analisis, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penulisan karya ilmiah ini menggunakan studi literatur, yang berarti penulis tidak melakukan observasi lapang secara langsung, melainkan merujuk pada informasi yang telah tersaji dalam sumber-sumber sekunder. Metode seperti ini seringkali disebut dengan studi kepustakaan, dan penulis melakukan pencarian di beberapa tempat yakni:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Kemudian sumber referensi sekunder yang digunakan penulis antara lain berupa:

1. Buku, jurnal, artikel dan laporan
2. Skripsi
3. Media cetak atau koran
4. Situs Internet
5. Video Dokumenter

1.7.2 Teknik Analisis Data

Ilmuwan sosial memiliki kemampuan untuk mengamati dunia secara objektif. Metode penelitian secara kualitatif dipilih penulis sebagai teknik analisis data pada karya ilmiah ini karena memiliki kemampuan untuk menjadi perangkat utama dalam penelitian (Salim, 2006:44). Deskriptif analisis dinilai menjadi teknik yang tepat dalam menganalisa permasalahan pada karya ilmiah ini.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

Dalam bab ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup pembahasan, tinjauan pustaka, kerangka konseptual dan teoritis, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Gambaran Umum Industri Sawit Indonesia

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Industri sawit Indonesia. Penjelasan akan mencakup industri sawit Indonesia, kelapa sawit dan olahannya, perkembangan proyeksi ekspor sawit Indonesia, sertifikasi ISPO dan ancaman isu lingkungan industri sawit Indonesia.

Bab 3 Kampanye Anti Sawit Uni Eropa

Dalam bab ini menjelaskan tentang kampanye anti sawit Indonesia oleh Uni Eropa yang berujung disahkannya Resolusi Sawit menghambat ekspor minyak sawit sejak tahun 2011 hingga tahun 2018.

Bab 4 Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Kampanye Hitam Anti Sawit Uni Eropa

Dalam bab ini menjelaskan sekaligus menganalisis bagaimana respon Indonesia dalam rangka meredam kampanye anti sawit Uni Eropa terhadap ekspor sawit Indonesia.

Bab 5 Kesimpulan

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan penulis sekaligus sebagai penutup pada karya ilmiah ini.



BAB 2

GAMBARAN UMUM INDUSTRI SAWIT INDONESIA

Bab ini akan menjelaskan gambaran umum industri sawit Indonesia. Mulai dari sejarah kelapa sawit Indonesia, industri sawit Indonesia, hingga perkembangan dan proyeksi kelapa sawit Indonesia. Penjelasan ini penting karena pembaca akan mengerti kondisi minyak sawit Indonesia dari jaman dahulu hingga saat ini. Dimana banyak sekali perubahan dan perkembangan yang sangat pesat. Semakin meluasnya lahan sawit yang menyebabkan semakin besarnya nilai produksi membuat sawit menjadi komoditi andalan bagi Indonesia. Kemudian diyakini bahwa kedepannya, sawit akan tetap menjadi primadona bagi pemasukan Indonesia.

2.1 Kelapa Sawit dan Olahannya

Penjelasan pada sub bab ini berfokus pada sejarah dari kelapa sawit, khususnya awal mula masuknya sawit ke Indonesia. Hal ini penting untuk diketahui mengingat sawit bukan berasal dari Indonesia, akan tetapi cocok ditanam dan perkembangannya sangat pesat. Produksi sawit tidak hanya terpaku pada minyak, akan tetapi juga diproduksi lebih lanjut menjadi produk turunan dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

2.1.1 Sejarah Kelapa Sawit Indonesia

Bagi Indonesia, kelapa sawit bukan merupakan tanaman asli. Pada awalnya, hanya empat biji kelapa sawit yang dibawa ke Indonesia dari tempat asalnya yakni Afrika. Kemudian biji sawit yang berjumlah empat biji itu ditanam di Kebun Raya Bogor tepatnya pada tahun 1848. Dari yang semula biji kemudian tumbuh subur dan ditanam tidak hanya di Kebun Raya Bogor saja. Akan tetapi di tempat lain juga bisa tumbuh dengan baik dan dirasa cocok untuk ditanam di banyak tempat yang ada di Indonesia. Kemudian sejak tahun 1910 kelapa sawit berkembang pesat dan dibudidayakan secara besar-besaran pada mulanya di Pulau Sumatera. Pertumbuhan kelapa sawit sangat ekstensif pada tahun 1917 dengan diadakannya program PIR (Perkebunan Inti Rakyat). Tidak hanya dari pemerintah akan tetapi dari sektor swasta juga mulai menjamur karena didukung dengan sektor perbankan pada tahun 1980an (GAPKI, 2017). Indonesia dengan iklim tropisnya memang sangat cocok

untuk ditanami pohon kelapa sawit. Oleh karena itu perluasan secara masif dilakukan untuk memberikan manfaat yang lebih banyak.

Pohon kelapa sawit dapat mencapai 24 meter. Hingga usia 12 tahun, batang tanaman sawit diselimuti dengan bekas pelepah. Kemudian setelah umur 12 tahun biasanya pelepah akan mengering dan akan terlepas dengan sendirinya. Hal ini yang menjadikan pohon kelapa sawit memiliki kemiripan dengan pohon kelapa (Kemendag RI, 2013). Walaupun mirip, akan tetapi sawit dirasa lebih bernilai ketika diproduksi. Terlebih ketika diolah menjadi produk olahan, akan lebih bernilai lagi.

Kelapa sawit merupakan komoditi pohon palem yang sangat produktif yang berkembang pesat di Indonesia. Kelapa sawit juga merupakan salah satu penghasil minyak nabati yang paling besar di dunia. Jika dibandingkan dengan minyak yang dihasilkan dari biji bunga matahari, minyak dari sawit masih jauh lebih efektif dan efisien. Dilihat dari luas lahan dan hasil produksi, lahan sawit membutuhkan lahan yang jauh lebih kecil dengan hasil produksi yang lebih besar hingga empat kali lipat dibandingkan dengan biji bunga matahari. Hal ini secara mendasar membuktikan bahwa kelapa sawit merupakan pilihan yang tepat untuk diproduksi secara terus menerus jika dibandingkan dengan biji bunga matahari yang memiliki ongkos produksi yang lebih besar namun hasilnya jauh lebih sedikit (Kemendag RI, 2013). Memang ada banyak jenis minyak nabati, akan tetapi sawit adalah yang paling efektif untuk ditanam dan di produksi jika dihitung dari biaya produksi yang kecil dan keuntungan yang didapat cukup besar.

Bisnis kelapa sawit sangat menguntungkan bagi Indonesia. Terdapat beberapa hal yang menjadi alasan mengapa menguntungkan. Pertama ialah margin laba yang besar akan tetapi sangat mudah untuk diproduksi. Kelapa sawit dianggap sebagai komoditas yang cukup mudah untuk diproduksi. Walaupun terdapat aturan-aturan ataupun Standar Operasional Prosedur yang ada, akan tetapi masih terhitung mudah untuk dipraktekkan dan diproduksi. Kemudian yang kedua adalah permintaan Internasional yang sangat besar, ini juga terus berkembang seiring terus meningkatnya jumlah penduduk di dunia. Indonesia memiliki banyak tujuan ekspor ke banyak negara, dan permintaannya terus bertambah yang membuat Indonesia

terus meningkatkan produksinya. Kemudian yang ketiga ialah biaya produksi sawit mentah (CPO) Indonesia merupakan yang paling murah di pasaran dunia. Dengan murah nya harga CPO tentu sawit Indonesia sangat diminati di pasaran global. Kemudian yang ke empat ialah tingkat produktivitas lebih tinggi jika dibandingkan dengan produk minyak nabati. Maksudnya, dengan lahan yang lebih kecil, perkebunan kelapa sawit dapat menghasilkan lebih banyak, ini berbanding terbalik dengan produk minyak nabati lainnya seperti biji bunga matahari milik Uni Eropa yang membutuhkan lahan besar namun hasil tidak sebesar sawit. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan biofuel yang diduga akan meningkat secara signifikan, dan di sisi lain penggunaan bensin diperkirakan akan berkurang. Minyak sawit dapat digunakan sebagai bahan bakar, sehingga dari waktu ke waktu penggunaannya semakin banyak untuk bisa digunakan sebagai bahan bakar motor menggantikan bensin (Kementerian Pertanian, 2016).

Indonesia memiliki keunikan dari sawit yakni adanya simbiosis antara sawit dengan hewan ternak sejenis sapi atau kerbau. Perpaduan antara perkebunan dan peternakan ini ternyata sangat menguntungkan bila dipadukan. Sejak tahun 2003, sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berasal dari Badan Litbang Pertanian, menunjukkan bahwa Integrasi Sapi dengan Kelapa Sawit (SISKA) sangat bagus dalam meningkatkan efisiensi agribisnis kelapa sawit. Di peternakan sendiri, dapat memanfaatkan biomassa gulma dan limbah tanaman dari kelapa sawit untuk berkembang biak ataupun berproduksi. Sedangkan bagi perkebunan sawit, hewan ternak dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu transportasi untuk dapat mengangkut tandan buah segar (TBS) ke tepi jalan perkebunan. Kemudian tandan buah segar yang sudah terkumpul akan diangkut menggunakan kendaraan bermotor. Hasil dari limbah ternak (*manure* dan *urine*) dan sisa pakan dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi pupuk organik untuk membantu kesuburan tanah yang dibutuhkan bagi pohon kelapa sawit. Simbiosis yang saling menguntungkan ini biasa disebut sebagai “simbiose sapi-sawit” (Kementerian Pertanian, 2011).

Namun demikian integrasi yang dilakukan antara perkebunan sawit dengan peternakan ini masih sering ditemukan beberapa kendala. Salah satunya ialah kurangnya sosialisasi yang menyebabkan perusahaan perkebunan masih belum terlalu paham akan manfaat yang akan didapat dari integrasi yang ada. Walaupun adanya integrasi sudah terasa manfaatnya hingga dapat meningkatkan pendapatan hingga 50% dari pendapatan sebelumnya. Akan tetapi perkembangan Sistem Integrasi Sapi – Kelapa Sawit masih sangat lamban. Kemudian ada juga dugaan dan kekhawatiran jika adanya peternakan di areal sawit dapat meningkatkan kepadatan tanah hingga penyakit yang menular ke tanaman. Hal ini diyakini disebabkan oleh jenis jamur *Ganoderma (Ganoderma boninense)* (Kementerian Pertanian, 2011).

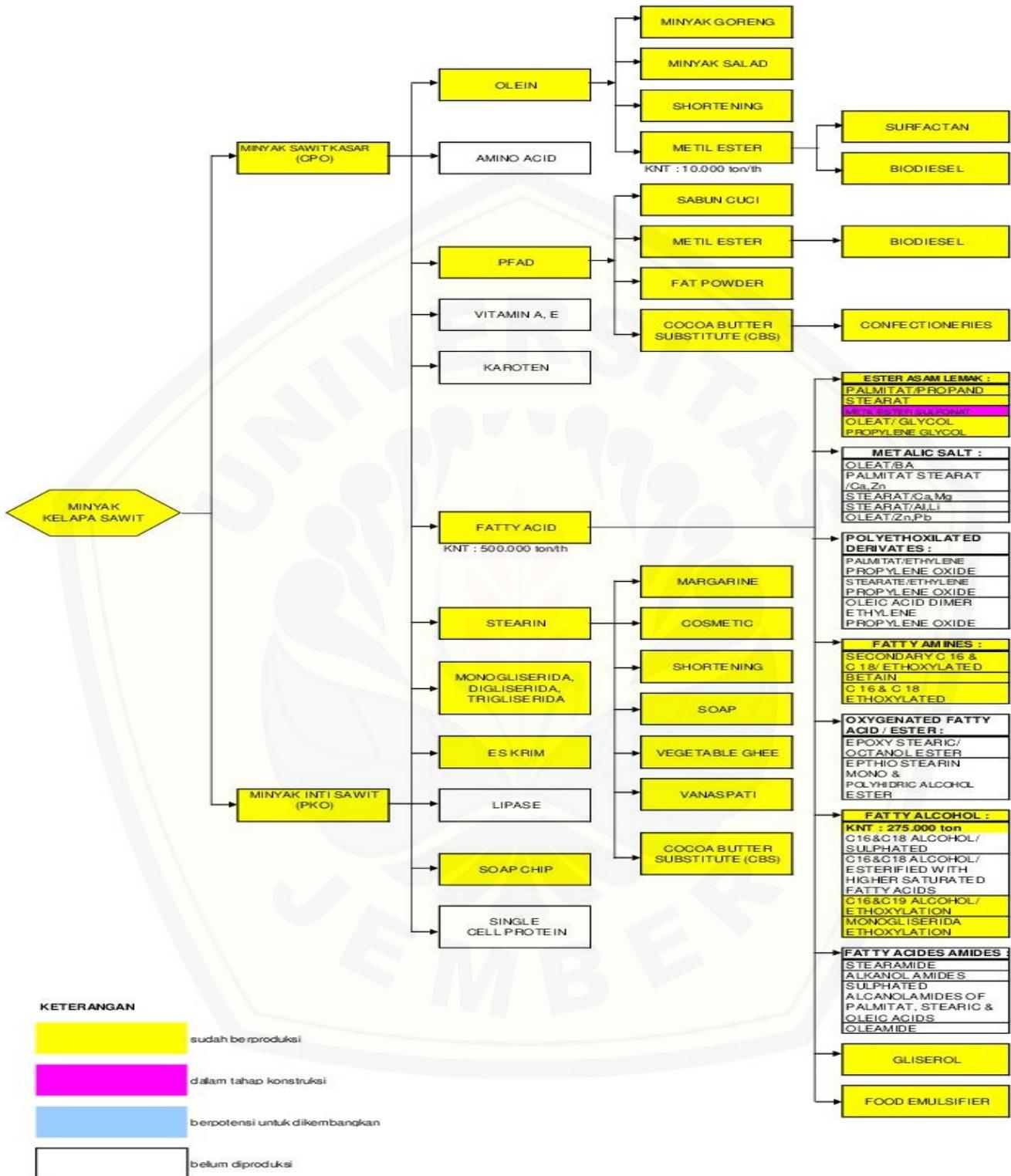
Indonesia tidak mau lupa dengan sejarah, hal ini dibuktikan dengan penandatanganan Tugu Prasasti Plasma Nutfah Kelapa Sawit yang ada di Kebun Raya Bogor oleh Presiden Joko Widodo. Acara tersebut adalah bentuk rasa syukur karena usia kedatangan sawit yang ada di Indonesia sudah mencapai 2 abad. Dengan adanya penandatanganan tersebut, seakan membuktikan bahwa sawit memang sangat berarti bagi Indonesia. Generasi masa kini diharapkan tidak lupa bagaimana sejarah sawit masuk ke Indonesia hingga sekarang menjadi primadona bagi perekonomian kita. Pertumbuhan yang sangat baik pada awal sawit masuk ke Indonesia, pada akhirnya menggugah seorang warga Belgia yang bernama M. Adrien Hallet yang kemudian membangun perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara dan Aceh pada tahun 1911 dengan total luas 2.630 hektar (Vebri, 2018). Semakin hari persebaran kelapa sawit semakin luas diiringi juga dengan penelitian-penelitian para akademisi di Indonesia yang semakin berfokus pada tanaman ini. Ini seakan membuktikan bahwa kelapa sawit merupakan sebuah nyawa bagi perekonomian Indonesia. Sebagai warga Indonesia tentunya wajib untuk mengenal lebih dalam lagi akan kegunaan dan manfaat dari tanaman ini. Karena keuntungan ekonomi yang di dapat dari tanaman ini sangat besar.

2.1.2 Produk Turunan dan Olahan Kelapa Sawit

Kelapa sawit adalah tanaman yang multifungsi yang dapat digunakan untuk banyak keperluan jika diolah menjadi produk turunan. Pemanfaatannya bisa dilakukan dalam bidang pangan maupun non pangan. Banyak sekali produk yang dapat dihasilkan dari tanaman kelapa sawit. Mulai dari *Crude Palm Oil*, *Palm Kernel Oil* atau bahkan limbah hasil dari produksi olahan sawit.

Kelapa sawit mempunyai pohon industri mulai dari pohonnya hingga pemanfaatannya menjadi berbagai macam produk olahan. Penjelasan awal dimulai dari bagian-bagian sawit yaitu TBS (Tandan Buah Segar) yang kemudian dipisahkan dengan buah sawitnya berubah menjadi tandan buah kosong, pelepah sawit, batang sawit, lihat Gambar 2.1. Kemudian buah sawit diolah dan menghasilkan dua macam minyak sawit yaitu:

1. Minyak Kelapa Sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) juga biasa disebut minyak sawit mentah. Awalnya didapat dari daging buah sawit (*palm mesocarp*) melalui proses pengepresan yang kemudian menghasilkan CPO. *Crude Palm Oil* kemudian diolah lagi menjadi Olein, amino acid, PFAD, karoten dan vitamin A dan E. Kemudian olein dapat dimanfaatkan menjadi minyak goreng, minyak salad, *shortening*, metil ester. Metil ester dapat diolah menjadi surfactan dan biodiesel. Selanjutnya yang dapat diolah lagi ialah PFAD bisa menjadi sabun cuci, metil ester, biodiesel, *fat powder*, *cocoa butter substitute* (CBS). CBS dapat diolah lagi menjadi Confectioneries.
2. Minyak Inti Sawit/ *Palm Kernel Oil* (PKO) juga biasa disebut *Crude Palm Kernel Oil* (CPKO) yang mana didapat dari pengepresan bagian inti sawit. Setelah diolah dapat menjadi fatty acid, stearin, monogliserida, digliserida, trigliserida, es krim, lipase, soap chip, single cell protein. Kemudian yang paling banyak memiliki manfaat ialah stearin, jika diolah lagi akan menjadi margarine, cosmetic, *shortening*, soap, vegetable ghee, vanaspati, *cocoa butter substitute* (CBS) (Hariyadi, dkk 2014).



Gambar 2.1 Pohon Industri Sawit dan Turunannya (Sumber: Kementerian Perindustrian, 2018)

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa minyak kelapa sawit dan minyak inti kelapa sawit memang memiliki banyak macam olahan ataupun campuran makanan jika terus diolah. Tidak hanya *Crude Palm Oil* dan *Palm Kernel Oil* saja akan tetapi jika diolah akan memberikan nilai tambah yang lebih besar. Kendati demikian, memang permintaan yang paling banyak hanya berhenti pada minyak kelapa sawit atau CPO.

Minyak kelapa sawit banyak sekali kegunaannya, atau dalam kata lain banyak sekali produk turunan yang bisa dihasilkan dari kelapa sawit. Beberapa produk atau fungsi dari minyak sawit dapat digunakan sebagai minyak masak, makanan, kosmetik, produk kebersihan, minyak industri, biodiesel, bahan makanan, dan lain-lain. Minyak sawit memiliki sifat tahan oksidasi bertekanan tinggi dan mampu melarutkan bahan kimia yang tidak larut dalam bahan kimia lain, kemudian juga memiliki daya melapis yang tinggi. Dengan kemampuan ini minyak sawit memiliki keanekaragaman fungsi dan dapat dimanfaatkan untuk membuat berbagai produk (Kemendag RI, 2013).

Minyak kelapa sawit juga digunakan sebagai energi alternatif pengganti minyak bumi. Pemerintah Indonesia serius dalam mengembangkan program pengganti minyak bumi ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan Presiden No 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Intruksi Presiden No 1/2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain pada 25 Januari 2006. Pemerintah Indonesia menetapkan kelapa sawit adalah sumber biofuel. Hal ini karena minyak yang dihasilkan dari kelapa sawit memiliki kadar minyak yang sangat tinggi yaitu berkisar 1.600 liter tiap hektarnya. Dengan angka yang tinggi seperti itu, minyak sawit sangat potensial untuk terus dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai bahan baku biodiesel (Masykur, 2013 : 103-105). Keanekaragaman tentang sawit memang sudah tidak diragukan lagi. Bahkan minyak bumi yang pada waktunya akan habis, dapat diganti dengan minyak sawit yang merupakan salah satu sumber energi alternatif yang tidak akan habis. Namun demikian untuk menuju kesana, diperlukan persiapan dan perencanaan yang tidak sederhana dan membutuhkan waktu yang tidak singkat juga. Oleh karena

itu, sebagai negara penghasil sawit yang melimpah, Indonesia sangat berpotensi untuk memanfaatkan sawit untuk berbagai keperluan.

Harga kelapa sawit dalam bentuk CPO cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dilihat pada tahun 2012 hingga tahun 2015 baik di pasar dalam negeri (spot Medan) maupun di pasar dunia (spot Rotterdam). Pada tahun 2015 harga CPO di Medan sebesar Rp. 6.691,-/kg, sedangkan di pasar dunia sebesar USD 575 /ton. Penurunan ini tentu sedikit demi sedikit berdampak terhadap pendapatan ataupun penghasilan para pegiat kelapa sawit. Khususnya para petani yang hanya mendapatkan sedikit jika dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh oleh pengusaha sawit. Untuk itu perlu adanya kajian yang menghasilkan sebuah kebijakan untuk dapat mengatasi terus menurunnya harga dari kelapa sawit baik di pasar domestik ataupun pasar dunia. Berdasarkan hasil dari SUSENAS – BPS, tingkat konsumsi minyak goreng per kapita pada tahun 2015 sebesar 11,23 kg/kapita, berarti total konsumsi domestik pada tahun 2015 sebesar 2,87 juta ton minyak goreng atau setara dengan 4,2 juta ton kelapa sawit (Kementerian Pertanian, 2016). Pemerintah perlu mengolah lagi kelapa sawit menjadi produk turunan, karena harganya pasti lebih bernilai. Walaupun memang permintaan terhadap CPO sangat tinggi akan tetapi perlu diperhatikan juga terkait keuntungan yang didapat ketika kelapa sawit diolah terlebih dahulu kemudian dijual. Nilainya akan lebih tinggi dari CPO.

2.2 Industri Sawit Indonesia

Dari waktu ke waktu, industri sawit Indonesia mengalami perubahan berupa perkembangan dan perbaikan standar. Sertifikasi berskala Internasional pada akhirnya dimiliki Indonesia. Pada sub bab ini akan menjelaskan bagaimana dinamika industri sawit Indonesia dari waktu ke waktu, yang mana dibutuhkan standar yang baik untuk dapat bersaing di dunia Internasional.

2.2.1 Dinamika Industri Sawit Indonesia

Industri sawit Indonesia memang terus mengalami pergerakan yang positif dari tahun ke tahun. Perkebunan sawit semakin meluas setiap tahunnya. Kedepannya, masih akan terus dibangun perkebunan sawit di beberapa daerah. Saat ini, Pulau Sumatera dan pulau Kalimantan masih menjadi yang terluas. Namun beberapa daerah lain juga sudah mulai tampak pembangunannya (Badan Pusat Statistik, 2017)



Gambar 2.2 Peta Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2016
(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017)

Perkebunan sawit di Indonesia semakin meluas setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan peta persebaran luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia pada tahun 2016 yang mana pada setiap pulau besar Indonesia terdapat perkebunan kelapa sawit. Pulau Sumatera dan Kalimantan menempati urutan teratas dalam jumlah total luas areal perkebunan sawit. lebih khusus lagi yaitu Provinsi Riau, Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah memiliki luas lahan masing-masing lebih dari satu juta hektar. Hal ini dikarenakan karena Indonesia memang sangat cocok dengan iklim tropisnya dalam penanaman pohon kelapa sawit (Badan Pusat Statistik, 2017). Kemudian di Pulau Jawa, Sulawesi dan Pulau Papua juga sudah mulai menanam kelapa sawit. Begitu juga dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Peta ini seakan membuktikan bahwa di setiap daerah di Indonesia bisa dan cocok

untuk ditanami kelapa sawit. Karena memang di Indonesia didukung dengan iklim tropis yang sangat cocok untuk tempat pohon kelapa sawit tumbuh dan berkembang.

Bagi Indonesia, industri sawit adalah suatu bagian yang sangat penting sekaligus kontroversial dalam pertumbuhan ekonomi saat ini. Sawit merupakan andalan devisa bagi Indonesia yang saat ini masih berada di posisi teratas pemasukan negara dengan posisi kedua disusul oleh Pariwisata. Pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit sangat menjanjikan dan masih menjadi tumpuan bagi Indonesia dalam sektor ekonomi. Pembahasan terkait manfaat ekonomi dibandingkan dengan biaya sosial dan lingkungan hidup semakin hari semakin terpolarisasi. Situasi ini semakin diperburuk dengan adanya para pengkritik yang memberikan tanggapan negatif terhadap industri sawit Indonesia (Paoli G.D, dkk : 2013). Akan tetapi dengan banyaknya permasalahan, minyak sawit akan tetap membawa keuntungan bagi perekonomian Indonesia. Hingga saat ini masih menjadi penyumbang devisa terbesar bagi negara dan yang pasti kehadirannya sangat membantu petani kecil yang hanya memiliki lahan sedikit.

Perkembangan sektor kelapa sawit yang cepat dalam kurun waktu empat dekade ini memberikan banyak manfaat bagi perekonomian. Kemudian seiring bertambahnya jumlah lahan, negara seakan abai dengan lingkungan yang menjadi kurang baik akibat meluasnya lahan sawit. Walaupun beberapa pihak mulai dari pemerintah Indonesia, pemerintah dari negara lain, para pembeli dan institusi keuangan dalam hal ini bank, sudah mendiskusikan terkait isu lingkungan ini. Beberapa langkah sudah diambil oleh pemerintah Indonesia untuk dapat mereduksi emisi gas rumah kaca atau *greenhouse gas* (GHG). Aksi ini dilakukan oleh beberapa pihak yakni pemerintah, penyuling, produsen, konsumen, juga dari pihak bank dan para investor saling bahu membahu untuk dapat meminimalisir adanya dampak negatif yang diakibatkan oleh perkebunan kelapa sawit (Van Gelder, dkk : 2017).

Sawit memang sangat berjasa dalam hal pendapatan sekaligus pemasukan bagi Negara Indonesia. Akan tetapi sawit bukan berarti tidak ada yang mengkritik. Kritik itu sendiri datang bukan hanya dari Indonesia akan tetapi datang juga dari pihak luar negeri. Mereka menuduh industri sawit Indonesia yang mengorbankan hutan lindung dan warga desa yang hidupnya sangat bergantung pada hutan. Kemudian dengan adanya perubahan alih fungsi lahan yang terjadi tersebut membuat gas rumah kaca (GRK) yang besar. Kerusakan keanekaragaman hayati juga tidak luput dari kritik, terlebih alih fungsi lahan yang dilakukan dengan cara membakar hutan. Karena cara ini dinilai lebih efektif, efisien dan pastinya lebih murah (Paoli G.D, dkk 2013). Perusahaan atau industri sawit tentunya lebih memilih suatu hal yang lebih efisien dan murah pastinya. Akan tetapi dampak lingkungan yang timbul akibat dari kebakaran hutan. Tentu sebagai warga Indonesia masih ingat bagaimana Kota Pekanbaru yang pernah diselimuti asap tebal hasil dari kebakaran hutan untuk alih fungsi lahan.

Banyak kasus juga dialami masyarakat pedesaan yang dirugikan dengan adanya alih fungsi lahan dan pembangunan industri sawit. Dengan hilangnya sumber daya alam yang mana merupakan tumpuan hidup mereka, ditambah lagi adanya kompensasi ganti rugi yang masih belum sepadan, ini membuat kehidupan warga pedesaan semakin sulit. Kelompok-kelompok etnis juga terlihat merasa lebih dirugikan. Karena masyarakat etnis tidak terbiasa dengan negosiasi ataupun transaksi bisnis. Hal ini ditambah lagi, banyak kasus yang beredar bahwa masyarakat setempat tidak dimintai konsultasi yang cukup sebelum izin sawit terbit. Oleh karena itu masyarakat setempat tidak mendapatkan imbalan yang setimpal, atau justru merugi dengan adanya pembelian lahan oleh industri sawit (Paoli G.D, dkk : 2013). Dengan banyaknya kasus seperti ini tentunya sebagai perusahaan atau pihak yang ingin membeli lahan harus bersifat jujur terhadap warga setempat. Terlebih lagi warga atau suku yang berada di lokasi masih belum terbiasa terhadap negosiasi atau hubungan timbal balik yang saling menguntungkan tersebut.

Berbicara mengenai perijinan untuk alih fungsi lahan. Pejabat pemerintahan daerah setempat memiliki wewenang untuk mengizinkannya. Pada dasarnya pemerintah setempat yang paling tahu dan yang paling kenal akan kondisi ataupun peluang pembangunan perkebunan sawit. Pengambilan keputusan tidak jarang sangat tidak masuk akal dan cenderung berpihak kepada industri yang hendak membangun perkebunan sawit. Pejabat setempat, seperti seorang Gubernur ataupun Bupati, seringkali pada akhirnya berhadapan dengan hukum karena izin yang diberikan bertentangan dengan hukum yang sudah ditetapkan. Salah satu contohnya yakni Bupati Kutai Kartanegara non aktif Rita Widyasari yang terpaksa mendekam di penjara karena didakwa dengan kasus suap dalam rangka memuluskan pemberian izin perkebunan sawit milik Abun yang luasnya mencapai 16.000 hektare di Desa Kupang Baru, Kutai Kartanegara (Sohuturon, 2018). Dengan adanya kasus seperti ini, seakan membuktikan bahwa perusahaan sawit melakukan segala cara untuk mendapatkan izin terbit dari pemerintah setempat. Suap yang diberikan kepada pejabat setempat juga mencerminkan bahwa para pejabat masih condong untuk membela perusahaan sawit dan tidak memikirkan bagaimana nasib dari warganya. Hal seperti ini bukan hal yang baru bagi Indonesia, masih banyak daerah lain yang mana pejabatnya menjadi tersangka kasus suap.

2.3.2 Sertifikasi ISPO

Perusahaan sawit atau industri kelapa sawit ditantang untuk meningkatkan kualitas dan komitmennya dalam hal pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Para pelaku usaha sudah mulai menjalankan kegiatan atau aktivitas perkebunannya dengan prinsip 3P (*People, Planet, Profit*). Walaupun tidak semua, dan bisa dikatakan hanya sebagian kecil yang menerapkan prinsip tersebut. Hal ini merupakan wacana atau termasuk dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian tahun 2015 hingga tahun 2019 (Kementerian Pertanian, 2017).

Bentuk konkritnya adalah sertifikasi bernama *Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System (ISPO)* yang sudah diatur dalam Perundangan Pertanian No. 11/2015. Hal ini tidak lain dilakukan dalam rangka menyeimbangkan antara beberapa tujuan. Pertama yakni tujuan ekonomi yang berkaitan dengan keuangan dan pendapatan. Kemudian terdapat sosial budaya, yang mana perkebunan sawit umumnya berada pada daerah yang masih kental dengan adat dan istiadat. Kemudian yang terakhir yaitu permasalahan pelestarian lingkungan. Hal ini yang sangat krusial karena perkebunan sawit banyak sekali menerima kritikan sekaligus hujatan karena alih fungsi lahan hampir selalu dilakukan untuk dapat membangun perkebunan kelapa sawit. Oleh sebab itu, ketiga tujuan tersebut merupakan poin-poin yang harus dipenuhi karena sudah termasuk dalam sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System (ISPO)* (Kementerian Pertanian, 2017). Perusahaan atau industri sawit dituntut untuk segera melakukan sertifikasi, ini juga upaya untuk berbenah diri dalam rangka mengembangkan perusahaan atau industri sawit. Ketika perusahaan sudah mulai untuk memenuhi langkah-langkah sertifikasi dan pada akhirnya lolos uji sertifikasi, maka akan berdampak pada penjualan dan kualitas sawit minyak sawit yang dihasilkan. Pada akhirnya pembeli puas dengan kualitas yang diberikan.

Program-program sudah banyak dilakukan untuk dapat mendukung perkebunan yang berkelanjutan. Antara lain ialah pemetaan lahan, pembinaan pekebun terkait praktek pengelolaan kebun yang baik, upaya perlindungan lahan gambut, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, hingga tata kelola area keanekaragaman hayati tinggi dan nilai konservasi dalam perkebunan. Program-program ini diharapkan dapat menjadi suatu cara untuk meningkatkan kualitas dari mulai perkebunan, hasil produksi hingga para pegawai ataupun para petani yang terjun langsung bergesekan dengan pengolahan kelapa sawit. Memang tidak mudah dalam melakukan perbaikan-perbaikan demi mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Akan tetapi pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus melakukan pengembangan dan pembaruan peraturan demi tercapainya perkebunan sawit yang berkelanjutan (Kementerian Pertanian, 2017).

Kementerian Pertanian sudah memproyeksikan sebanyak 14 juta hektar kelapa sawit akan memiliki sertifikat Sustainable Palm Oil Certification System (ISPO) pada tahun 2020. Hal ini merupakan langkah yang bagus dalam memberikan motivasi terhadap industri sawit yang mana pada saat ini program berjalan masih sebesar 25%. Namun dalam berjalannya sertifikasi masih terdapat hal-hal yang menyulitkan tercapainya sertifikasi. Salah satunya ialah kendala terkait sinergi antar lembaga yang seringkali terjadi tumpang tindih dengan izin perkebunan kelapa sawit. Masih terdapat kasus dimana perkebunan kelapa sawit yang berdiri di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang mana kemudian diputuskan menjadi kawasan hutan lindung oleh pemerintah setempat dan menerbitkan rencana tata ruang yang baru (Gumilar, 2018).

Perkebunan atau Pabrik Kelapa Sawit harus terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No.7 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penilaian Perusahaan Perkebunan. Kemudian setelah sesuai dengan peraturan menteri tersebut, perkebunan dapat mengajukan permohonan sertifikasi ISPO (Info Sawit, 2018). Perihal standarisasi, dari awal memang sudah diatur sedemikian rupa. Kemudian lebih dikembangkan lagi ke arah sertifikasi.

Terkait permasalahan lahan sawit, Kementerian Pertanian terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup guna tercapainya sertifikasi yang diinginkan. Pihak dari Kementerian Pertanian berjanji akan menyelesaikan persoalan permasalahan antara kawasan hutan dan kelapa sawit dalam kurun waktu dua tahun. Pada 2017 sudah tercatat terdapat 346 sertifikat yang diterbitkan. Masih kurang 1.038 untuk mencapai angka 100%. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang tidak mudah untuk sesuai dengan target dari Kementerian Pertanian. Terlebih lagi masih banyak kendala-kendala yang menghambat berjalannya sertifikasi. Namun demikian bukan hal yang sulit ketika semua pihak bersinergi dengan baik mensukseskan jalannya sertifikasi (Gumilar, 2018). Pada dasarnya, ISPO membuktikan bahwa "*black campaign*" atau kampanye hitam oleh Uni Eropa adalah tidak benar. Karena lahan sawit yang sudah bersertifikasi ISPO adalah lahan perkebunan yang tidak berada di kawasan hutan lindung dan tata kelola yang berlangsung sudah sesuai dengan perijinan yang ada. Namun demikian Uni Eropa

masih tetap tidak menerima ISPO. Hal ini patut dicurigai karena Indonesia sudah mencoba untuk mentaati aturan atau sudah berusaha menciptakan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Akan tetapi masih belum bisa mencairkan ketegangan yang dilakukan oleh Uni Eropa. Maka dari itu, Indonesia masih terus berusaha agar kampanye yang dilakukan oleh Uni Eropa dapat dihentikan dengan adanya sertifikasi ISPO (Gumilar, 2018).

Selain *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), juga ada *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Pada dasarnya keduanya merupakan sistem sertifikasi yang bertujuan untuk memberikan aturan-aturan kepada industri atau perusahaan sawit untuk dapat menciptakan industri yang ramah lingkungan, ramah masyarakat, dan sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang sudah ditetapkan. Antara ISPO dan RSPO keduanya saling bekerja sama dengan melakukan studi bersama terkait persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Kerja sama tersebut merupakan sebuah wujud kesadaran akan pentingnya sertifikasi industri sawit agar dapat sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Studi ini didukung oleh Kementerian Pertanian dan PT. Mutu Agung Lestari sebagai lembaga sertifikasi independen memiliki kompetensi independen yang secara langsung ditunjuk sebagai pelaksana studi sekaligus sebagai lembaga yang akan melakukan audit. Dalam studi yang sudah dilakukan, ditemukan persamaan tujuan yakni, menekan angka tutupan hutan, mengurangi emisi gas rumah kaca dari alih fungsi lahan. Kemudian perbedaan yang mendasar ialah terkait kawasan lindung dan konsep nilai konservasi tinggi, prosedur pemindahan hak lahan sawit yang mana sudah diatur dalam *Free Prior Informed Consent* (FPIC) dalam RSPO, dan yang terakhir juga terkait penanaman baru (RSPO, 2016). Pada hakikatnya, dengan sinergi ini diharapkan kedua jenis sertifikasi ini dapat saling bahu membahu untuk melengkapi segala kekurangan yang ada. Kemudian dengan adanya studi ini juga dapat menghasilkan solusi-solusi ataupun langkah-langkah yang baru demi tercapainya kelapa sawit yang ramah lingkungan dan kerjasama dari semua pihak mulai dari pemerintah, pihak industri maupun masyarakat setempat.

Isu yang berhembus ditujukan kepada Indonesia adalah terkait rendahnya jumlah perusahaan yang sudah tersertifikasi. Padahal CSPO atau *Certified Sustainable Palm Oil* Indonesia adalah yang paling banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Berdasarkan data dari *Roundtable Sustainable Palm Oil* (2014). Indonesia menempati posisi paling atas dengan perolehan angka 49%, Malaysia 40%, Papua New Guinea 6% dan beberapa negara lain tidak lebih dari 5% (PASPI, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa isu, mitos ataupun hal negatif yang ditujukan terhadap perusahaan sawit Indonesia terkait rendahnya sertifikasi itu tidak benar. Indonesia sudah berkomitmen untuk mengikuti aturan yang ada dengan cara mengikuti aturan sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil*.

Namun demikian pada nyatanya, sebuah sertifikasi bukan berarti bebas dari kepentingan. Mekanisme yang dipergunakan juga masih kental terhadap kepentingan politik ekonomi (Fuady, dkk 2014). Maka dari itu Indonesia membuat sertifikasi tandingan yang bernama *Indonesian Sustainable Palm Oil*. Ini sangat bagus mengingat Indonesia lebih bisa leluasa dalam melakukan sertifikasi tanpa harus merasa dicurangi oleh pihak internasional, dalam hal ini sertifikasi yang dimaksud adalah *Roundtable Sustainable Palm Oil*.

2.3 Arti Penting Kelapa Sawit Bagi Perekonomian Indonesia

Penjelasan berikut terkait perkembangan produksi sawit Indonesia dan proyeksi di masa depan. Pada saat ini sawit Indonesia masih berada pada jalur positif. Artinya, dalam kurun waktu yang cukup panjang di masa depan, produksi sawit Indonesia masih akan menjadi yang terbanyak, dan ekspornya masih merajai dunia. Hal tersebut yang membuat kelapa sawit masih sangat penting bagi perekonomian Indonesia.

2.3.1 Perkembangan Ekspor Kelapa Sawit Indonesia

Kontribusi paling besar pada ekspor kelompok industri makanan adalah ekspor minyak kelapa sawit. Pada tabel dibawah memang sangat jelas terlihat bahwa nilai ekspor kelapa sawit sempat mengalami pasang surut. Kemudian tahun 2011 nilai ekspor kelapa sawit meningkat 29,22 persen hingga nilainya mencapai

US\$17.703,3 juta. Kemudian ditahun 2012 mengalami peningkatan lagi sebesar 4,12 persen dengan nilai sebesar US\$18.461,5 juta. Akan tetapi di tahun berikutnya yaitu pada 2013 nilai ekspor kelapa sawit mengalami penurunan 9,07 persen dengan total nilai US\$16.787,5 juta. Kenaikan lagi terjadi pada tahun 2014 dengan peningkatan sebesar 10,89 persen dengan kenaikan nilai sebesar US\$18.615,0 juta. Pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2015 terjadi penurunan angka sebesar 11,75 persen dengan besaran nilai US\$16.427,0 juta. Kemudian terjadi penurunan lagi pada tahun 2016 sebesar 2,88 persen menjadi 15.966,4 juta. Nilai ekspor sawit akhirnya mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 27,40 persen dengan nilai US\$20.340,9 juta. Jika dirata-rata kontribusi ekspor oleh kelapa sawit mencapai 63,18 persen (Badan Pusat Statistik, 2018). Dilihat dari besaran nilai ekspor dari tahun 2011 hingga tahun 2017, pada tahun 2017 merupakan tahun dimana jumlah ekspor sawit paling banyak.



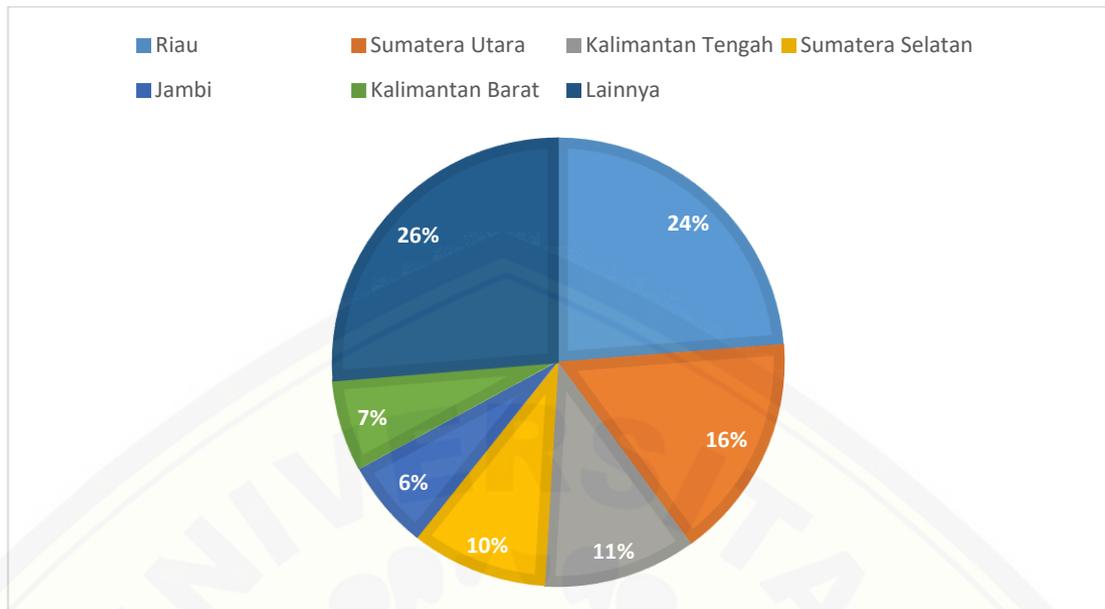
Gambar 2.3 Ekspor Kelapa Sawit 2011-2017
(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018)

Menurut Badan Pusat Statistik (2018), selama 2 tahun terakhir ini tujuan utama ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke tiga negara yaitu Pakistan, Tiongkok, India. Ekspor ke negara Pakistan sebesar 7,25 persen dengan nilai US\$1.474,7 juta. Negara Tiongkok menerima ekspor sebesar 13,04 persen dengan nilai US\$2.651,8. Kemudian Negara India dengan total ekspor yang paling besar

yakni 24,10 persen dengan besaran nilai US\$4,901,2 juta. Pada tahun berikutnya yakni 2017, ekspor ke beberapa negara tersebut mengalami kenaikan dimulai dari Pakistan sebesar 13,30 persen, ke Negara Tiongkok sebesar 21,07 persen dan yang paling besar yaitu ke Negara India dengan besaran nilai 42,08 persen. Dari angka-angka yang disebutkan diatas memang terlihat jelas bahwa minyak kelapa sawit Indonesia sangat diminati oleh negara-negara lain. Kemudian angka kebutuhan mereka juga terus bertambah. Hal ini merupakan momentum bagus untuk terus meraup keuntungan dari ekspor minyak kelapa sawit demi memajukan perekonomian.

2.3.2 Proyeksi Produksi Kelapa Sawit Indonesia

Indonesia memiliki proyeksi yang sangat baik dalam hal produksi kelapa sawit. Hal ini dibuktikan dengan proyeksi kelapa sawit pada tahun 2020 mencapai 41,32 juta ton. Namun sisi lain, proyeksi konsumsi langsung kelapa sawit di tahun yang sama mencapai 4,63 juta ton. Hal ini merupakan suatu bukti dimana tren sawit selalu memiliki tren yang positif dari waktu ke waktu. Ini juga membuktikan bahwa permintaan akan sawit Indonesia terus meningkat (Kementerian Pertanian, 2016). Indonesia beruntung memiliki lahan yang sangat luas, perkebunan sawit juga akan terus bertambah seiring dengan proyeksi yang semakin meningkat dan permintaan para pembeli yang terus menerus menaik angka permintaannya. Untuk itu Indonesia harus siap untuk memenuhi dan menyanggupi berapapun angka yang diminta oleh para pembeli baik di dalam maupun luar negeri.



Gambar 2.4 Provinsi Sentra Produksi Minyak Sawit di Indonesia, rata-rata 2012-2016
(Sumber: Kementerian Pertanian, 2016)

Indonesia merupakan sentra produksi kelapa sawit terdapat di enam provinsi yang berkontribusi memberikan hasil sawitnya yakni sebesar 73,69% terhadap total produksi minyak sawit Indonesia. Posisi teratas diduduki oleh provinsi Riau dan Sumatera Utara dengan masing masing sebesar 23,75% dan 16,24%. Selanjutnya disusul oleh Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi dan Kalimantan Barat dengan total produksi masing-masing yaitu sebesar 10,96%, 9,76%, 6,39%, dan 6,60% (Kementerian Pertanian, 2016).

Sebagai produsen sawit terbesar di dunia dan eksportir terbesar, Indonesia terus meningkatkan sekaligus mempertahankan posisinya sebagai papan atas eksportir di dunia. Walaupun banyak sekali hambatan yang dimiliki Indonesia, akan tetapi dengan adanya tren positif yang ada, ini sekaligus menepis anggapan buruk tentang sawit. Justru dengan adanya permintaan yang semakin meningkan hal ini mencerminkan bahwa dunia masih sangat membutuhkan peran Indonesia dalam memproduksi minyak sawit dalam rangka memenuhi kebutuhan minyak nabati di Negeranya (Kementerian Pertanian, 2016). Jadi dalam jangka waktu yang lama Indonesia masih diperlukan kontribusi besarnya sebagai penyumbang minyak kelapa sawit di dunia. Karena permintaan CPO atau *Crude Palm Oil* sangat tinggi.

Indonesia sempat berada di bawah Malaysia dalam hal produksi. Tepatnya sebelum tahun 2006, Malaysia masih mengunggul Indonesia. Namun demikian lahan dan produksi sawit di Indonesia terus berkembang. Pada tahun 2006 dan seterusnya Indonesia berhasil menjadi produsen sawit terbesar di dunia. Pada tahun 2017 pangsa pasar Indonesia jauh diatas Malaysia dengan total 58 persen sedangkan Malaysia hanya 29 persen dari total produksi minyak sawit dunia (Sawit.or.id, 2018). Hal ini membuktikan bahwa Indonesia akan terus mengembangkan dan memperluas lahan yang dimilikinya untuk dapat memperluas lahan dan memperbanyak produksinya. Karena Indonesia diuntungkan dengan jumlah lahan yang luas dan sangat cocok untuk perkebunan kelapa sawit.

Perkebunan kelapa sawit Indonesia dikelola oleh 3 pihak, yang pertama ialah pihak swasta yaitu Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang memiliki luas area paling banyak sebesar 50,77%. Perkebunan Rakyat (PR) menyumbang sebesar 37,45%. Kemudian yang paling sedikit adalah milik pemerintah yaitu Perkebunan Besar Negara (PBN) sebesar 11,78%. Pihak swasta menjadi pemain penting dalam hal mengembangkan produksi sawit Indonesia. Para investor secara tidak langsung membantu negara dalam memenuhi permintaan sawit yang meningkat tiap tahunnya. Dinamika luas lahan sawit Indonesia memang terus menerus mengalami perubahan, yang terjadi ialah perkebunan milik Pemerintah yang tidak banyak berkembang. Dapat dibuktikan dengan data, pada tahun 1980 hingga tahun 1997 kontribusi PBN sebesar 31,19%. Kemudian untuk saat ini luas area menjadi yang paling kecil dengan jumlah 11,78%. Demikian juga dengan pertumbuhan produktivitas yang tidak sepenuhnya menunjukkan tren positif. Pada krisis moneter hanya terjadi sedikit peningkatan yakni sebesar 0,64% per tahun. Kemudian berangsur pulih hingga puncaknya pada tahun 2016 sebesar 3,82 ton/ha (Kementerian Pertanian, 2016). Dinamika penjualan sawit Indonesia memang sempat terjadi penurunan maupun kenaikan. Akan tetapi proyeksi menunjukkan tren positif. Sawit akan selalu menjadi andalan Indonesia dalam hal pemasukan atau devisa negara.

Tabel 2.1 Proyeksi Produksi Kelapa Sawit di Indonesia 2016-2020

Tahun	Produksi (Ton)	Pertumbuhan (%)
2016*)	33,500,691	
2017	35,294,462	5.35
2018	37,303,695	5.69
2019	39,312,928	5.39
2020	41,322,162	5.11
Rata-rata Pertumbuhan (%)		5.39

Keterangan :

Tahun 2016 Angka Estimasi Ditjenbun

Tahun 2017-2020 Estimasi Pusdatin

(Sumber: Kementerian Pertanian, 2016)

Peningkatan jumlah pertumbuhan produksi kelapa sawit terus meningkat sebesar 3,99% per tahun pada periode 2016-2020. Prediksi selanjutnya yaitu diprediksikan pada tahun 2020 mencapai 4,63 juta ton. Proyeksi semacam ini dilakukan menggunakan analisis konsumsi per kapita minyak goreng sawit. Data yang ada diperoleh dari hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 1993-2015. Konsumsi minyak sawit di Indonesia diperoleh dari konsumsi minyak goreng (kg/kapita/tahun) yang berasal dari SUSENAS dikalikan dengan jumlah penduduk/kapita sehingga menghasilkan konsumsi nasional minyak goreng sawit (kg). Kemudian dikonversikan ke dalam minyak sawit/crude palm oil (CPO) dengan membagi sebesar 68,28%. Kemudian pengolahan data dan penelusuran model akan di dapat dari model tren exponential (exponential growth), dengan nilai MAPE 5,89 (Kementerian Pertanian, 2016). Salah satu faktor peningkatan yang terjadi ialah dikarenakan permintaan dan jumlah konsumsi masyarakat Indonesia maupun dunia terus menerus bertambah. Kemudian dilakukan survei dengan data dan fakta yang ada menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa produksi akan terus menerus bertambah.

Setelah tahun 2021 harga minyak sawit mentah (CPO) diperkirakan akan mengalami masa peningkatan (*bullish*). Hal ini terjadi karena adanya proyeksi penurunan produksi yang akan berlaku di Indonesia dan Malaysia pada periode tahun 2022 hingga tahun 2025. Hal ini dilansir dari laporan Rabobank, diprediksi bahwa akan ada penurunan produksi dari tandan buah segar (TBS) sawit. Hal ini karena rata-rata usia pohon sawit sudah terlalu tua. Sawit memerlukan adanya peremajaan dan kegiatan penanaman kembali (*replanting*). Ini berlaku bagi Indonesia dan Malaysia. Pernyataan dari Senior *Analyst of Grains and Oilseeds, Food and Agribusiness*, Oscar Tjakra, pohon sawit membutuhkan waktu empat tahun hingga bisa layak untuk diproduksi secara baik dan menghasilkan 10 ton tandan buah segar per hektarnya. Semakin berumur pohon sawit. Maka akan lebih banyak menghasilkan atau lebih besar jumlah produksinya. Usia yang sangat produktif yakni pada usia sembilan hingga 17 tahun yang mana akan menghasilkan 25 ton tandan buah segar per hektar. Pada usia diatas 25 tahun, produktivitas akan menurun dibawah 15 ton per hektar. Indonesia dan Malaysia, rata-rata usia pohon sawit masing-masing yakni sekitar 9% dan 36% berada pada usia diatas 25 tahun. Rabobank juga melaporkan bahwa pertumbuhan rata-rata per tahun (CAGR) untuk konsumsi minyak sawit global mencapai 2,85 pada periode tahun 2018 hingga tahun 2030 dan pertumbuhan per tahunnya hanya berkisar 1,4%. Hal ini akan berdampak pada harga sawit global yang mana tujuan ekspornya yakni Asia Tenggara, India dan Afrika yang bekerjasama dalam permintaan ekspor sawit jangka panjang (Info Sawit, 2018). Pohon kelapa sawit yang sudah berusia diatas 25 tahun sudah tidak bisa banyak menghasilkan kelapa sawit. Untuk itu perusahaan perlu untuk melakukan peremajaan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Dalam waktu dekat perusahaan sawit juga akan melakukan efisiensi operasional untuk mengurangi biaya produksi dan mempercepat konsolidasi di industri sawit. Hal ini dikarenakan rendahnya harga minyak sawit sebelum 2022. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa persiapan untuk kenaikan harga sawit memang akan terjadi pada setelah tahun 2021. Kemudian rencana yang akan dilakukan terkait penanaman kembali (*replanting*) tidak hanya harus dilakukan oleh perusahaan besar akan tetapi juga perusahaan sawit skala kecil yang sumbangannya

sekitar 39% dari total perkebunan sawit Indonesia. Walaupun perusahaan akan mengalami potensi pendapatan jangka pendek selama tiga hingga empat tahun akan tetapi hal ini harus dilakukan untuk mencegah kerusakan hutan dan peningkatan produktivitas tandan buah segar. Kesejahteraan petani kecil juga berdampak pada peremajaan ini yang akan membuat sejahtera dalam jangka panjang (Info Sawit, 2018). Jadi *replanting* memang diperlukan walaupun akan mengakibatkan penurunan pendapatan selama beberapa tahun dikarenakan pohon sawit perlu waktu yang tidak singkat untuk tumbuh dewasa. Akan tetapi ini adalah suatu bentuk perencanaan yang baik dalam jangka waktu yang panjang. Karena pohon sawit memang membutuhkan peremajaan untuk menghasilkan minyak sawit yang berkualitas.

BAB 3

KAMPANYE ANTI SAWIT OLEH UNI EROPA

3.1 Perkembangan Kampanye Hitam Sawit

Kampanye hitam atau *black campaign* merupakan sebuah sebutan yang digunakan Indonesia untuk menyebut gerakan-gerakan yang berkampanye dengan menyuarakan anti sawit. Hal ini dilakukan oleh negara-negara di Uni Eropa maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengkritik industri sawit Indonesia. Ini dibuktikan dengan maraknya pemberitaan yang menggunakan *lead* berita “kampanye hitam” atau “black campaign”. Gerakan-gerakan tersebut melemahkan posisi Indonesia sebagai pengeksport sawit terbesar di Eropa. Minyak sawit Indonesia seakan-akan terus-menerus berdampak negatif terhadap lingkungan (Novriansyah, 2017). Kendati demikian sebutan kampanye hitam dilontarkan Indonesia dalam menyebut segala bentuk kampanye anti sawit yang dilakukan oleh negara-negara di Eropa maupun LSM.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang mendapatkan kampanye hitam, namun Negara Malaysia juga demikian. Malaysia juga disebut dan menjadi salah satu negara yang merusak lingkungan menurut Parlemen Eropa. Oleh karena itu Indonesia dan Malaysia sepakat bekerja sama dalam memerangi kampanye hitam yang dilakukan oleh Uni Eropa. Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad yang disampaikan di Istana Negara Indonesia saat melakukan kunjungan luar negeri pertamanya ke Indonesia (CNN Indonesia, 2018). Hal ini membuktikan bahwa kampanye hitam tidak hanya menyerang Indonesia, akan tetapi juga negara tetangga yaitu Malaysia. Hal itu karena memang dari jumlah produksi, Indonesia dan Malaysia adalah yang terbanyak, terlebih lagi angka eksportnya yang masuk ke Uni Eropa sangat besar.

Menjadi negara yang sama-sama dirugikan akibat kampanye hitam, kedua negara yakni Indonesia dan Malaysia melakukan kerja sama. Duet antara Mahathir dan Joko Widodo seakan membuktikan bahwa kedua pemimpin negara ini saling mendukung untuk melawan kampanye hitam yang dilakukan Eropa. Perdana Menteri Mahathir juga sempat menyatakan bahwa Uni Eropa sebenarnya sudah menebang hampir semua hutan, akan tetapi tidak ada yang membantah (Stefanie,

2018). Dengan adanya fakta yang menyatakan bahwa Uni Eropa sebenarnya juga sudah melakukan penebangan hampir semua hutannya dan tidak ada yang protes, akan tetapi berbanding terbalik ketika ada negara lain yang melakukan hal serupa. Hal ini tentu mencerminkan diskriminasi terkait industri minyak sawit, yang mana Uni Eropa sendiri memproduksi minyak jenis lain seperti *rapeseed* dan *soybean* yang hadir sebagai saingan.

Tabel 3.1 Perbandingan Harga *Rapeseed Oil* dengan *Palm Oil*

Bulan	Harga <i>Rapeseed Oil</i>	Harga <i>Palm Oil</i>
November 2017	962.98	728.86
Desember 2017	901.97	679.17
Januari 2018	848.38	703.45
Februari 2018	827.48	703.45
Maret 2018	800.24	706.19
April 2018	793.31	701.18
Mei 2018	811.49	687.29
Juni 2018	838.02	656.50
Juli 2018	848.61	616.14
Agustus 2018	853.67	614.10
September 2018	821.47	605.15
Oktober 2018	850.55	590.32
November 2018	840.58	539.78

(Sumber: Index Mundi, 2018)

Harga *rapeseed oil* dari bulan November 2017 hingga bulan November 2018 selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga *palm oil*. Hal ini membuktikan bahwa Uni Eropa memilih *palm oil* karena harganya lebih terjangkau. Namun ketika Resolusi Sawit diimplementasikan, Uni Eropa secara otomatis akan menggunakan *rapeseed oil*, karena *palm oil* dilarang penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Uni Eropa lebih memprioritaskan komoditasnya sendiri walaupun harganya tinggi dan ini merupakan kepentingan ekonomi Uni Eropa, bukan kepentingan lingkungan.

3.2 Bentuk-bentuk Kampanye Hitam

3.3.1 Pelabelan Produk Dengan “*Palm Oil Free*”

Pusat perbelanjaan di Islandia mulai melabeli produknya dengan *palm oil free* yang dimaksudkan untuk menjelaskan kepada pembeli bahwa produknya bebas dari minyak sawit. Spesialis *Frozen Food* menyatakan bahwa setengah dari produk-produk makanan sudah mulai dilabeli. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa campuran dari sawit dinilai kontroversial. Hal ini ditambah lagi dengan pernyataan dari Geenpeace bahwa dengan adanya perkebunan sawit maka akan berimbas terhadap etnis lokal dan keanekaragaman hayati maupun hewani yang ada. Tidak hanya berhenti di pelabelan, Islandia juga berjanji akan mengganti bungkus plastiknya dengan bahan yang lebih ramah lingkungan hingga tahun 2030 secara bertahap (Frangoul, 2018). Kesadaran akan pentingnya lingkungan mulai digalangkan dengan bentuk yang bermacam-macam.

Spar Austria yang merupakan supermarket berencana akan menghapus minyak sawit dari semua label pribadinya di akhir tahun 2018. Spar akan mengganti minyak sawit dengan minyak dan lemak yang lebih sehat dalam versi label pribadinya. Hal itu dilakukan karena terus meningkatnya permintaan untuk melarang penggunaan minyak sawit yang merusak lingkungan hingga hewan. Oleh karena itu, Spar terus meneliti untuk mencari alternatif pengganti minyak sawit. Alternatif lain ialah menggantinya dengan minyak bunga matahari atau minyak *rapeseed* atau mentega. Spar Austria juga sudah memperkenalkan krim coklat kemiri bebas minyak kelapa sawit. (ESM Magazine, 2018). Secara tidak langsung, apa yang dilakukan oleh Spar Austria berdampak pada berkurangnya kebutuhan minyak kelapa sawit, yang kemudian digantikan oleh minyak bunga matahari. Hal ini dapat dikatakan bahwa Spar Austria menganggap negatif terhadap minyak kelapa sawit.

3.3.2 Kampanye Hitam Oleh *Greenpeace*

Industri sawit Indonesia ternyata juga mendapat kampanye hitam dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan oleh anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Fadel Muhammad. Fadel Muhammad menyatakan bahwa semenjak Lembaga Swadaya Masyarakat menyampaikan informasi yang tidak benar mengenai sawit, situasi justru semakin buruk. Lembaga Swadaya Masyarakat bernama *Greenpeace* mengkritik sawit Indonesia dan dikaitkan dengan isu lingkungan, deforestasi, dan hak asasi manusia. Namun yang mengejutkan, Lembaga Swadaya tersebut berasal dari Indonesia dan disinyalir mendapat suntikan dana dari Uni Eropa. Lembaga Swadaya Masyarakat ini dengan jelas mendukung adanya Resolusi Sawit Eropa yang merugikan Indonesia (DPR RI, 2018). Dengan adanya ulah yang merugikan industri sawit Indonesia, seolah-olah Lembaga Swadaya Masyarakat ini menggadaikan kepentingan rakyat Indonesia diatas kepentingan asing. Seolah-olah asing sudah menyuap LSM untuk melakukan pemberitaan tidak benar.

Aktivis dan Organisasi peduli lingkungan juga sangat aktif menyuarakan kritikkannya kepada pegiat sawit Indonesia. Menurut *Greenpeace*, Indonesia melakukan kerusakan hutan paling cepat jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki area hutan. Tercatat oleh *Guinness Book of Record* lahan hutan berkutang 2% dari luas total hutan Indonesia setiap tahunnya. Dengan adanya pengurangan lahan setiap tahunnya, maka otomatis menempatkan Indonesia sebagai negara dengan urutan ketiga penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca dimana urutan teratas diraih oleh China dan Amerika Serikat. Pengerusakan atau alih fungsi lahan yang dilakukan Indonesia ini dilakukan mulai dengan cara ditebang hingga dibakar yang mana biaya yang dikeluarkan lebih mudah apabila dilakukan dengan cara dibakar (*Greenpeace*, 2010). *Greenpeace* mengamati perubahan-perubahan lingkungan yang dilakukan oleh Indonesia. *Greenpeace* menilai bahwa apa yang terjadi pada hutan Indonesia sangat merugikan habitat orangutan.

Wajar jika *Greenpeace* masih memberikan kritik terhadap industri sawit. Industri-industri sawit yang sejatinya berjanji akan memperbaiki sistem dengan menerapkan kebijakan “nol deforestasi”, pada kenyataannya mereka gagal untuk membuktikan adanya perbaikan tersebut. *Greenpeace* sudah melakukan pemeriksaan terhadap 11 pedagang, dan pada nyatanya sebagian besar dari mereka tetap mengambil pasokan dari industri yang melakukan penghancuran hutan yang artinya masih melakukan deforestasi. Dampak deforestasi juga terasa pada satwa langka seperti orangutan yang ada di Kalimantan dan Sumatra yang semakin hari semakin menurun polulasinya (Greenpeace, 2017). Hal ini seakan membuktikan bahwa industri sawit Indonesia masih belum serius untuk tidak melakukan deforestasi. Alih-alih memperbaiki kerusakan, justru membuat kondisi lingkungan semakin rusak.

Habitat satwa langka menjadi semakin sempit dengan adanya perluasan lahan yang terus menerus. Orangutan di daerah Sumatra dan Borneo terhitung dari perbandingan sebanyak 52 populasi orangutan Meta, dan hanya sekitar 38% yang sehat dan mampu untuk bertahan hidup. *International Union on Conservation Nature* (IUCN) juga mengemukakan bahwa orangutan asal Borneo sudah masuk dalam kategori “*critically endangered*”. *International Union on Conversation Nature* bukan tanpa alasan menetapkan status tersebut, hal ini berdasarkan kebakaran hutan yang sangat hebat yang terjadi pada tahun 2015 di Borneo yang mengakibatkan spesies orangutan semakin terancam. Kemudian harimau sumatera, corak merak juga terancam akan punah jika terus menerus dilakukan alih fungsi lahan. Pihak *Greenpeace* juga menyatakan bahwa Indonesia gagal dalam melindungi satwa langkanya dengan membiarkan perusahaan sawit terus memperluas perkebunan yang mana pada mulanya adalah lahan gambut yang juga merupakan rumah bagi orangutan. (Greenpeace, 2017). Perluasan lahan sawit secara terus menerus tentu membuat kerusakan semakin parah. Terlebih lagi tidak adanya bukti nyata perbaikan justru semakin memperparah keadaan. Oleh karena itu, perlu tindakan serius untuk dapat memperbaiki lingkungan, atau minimal tidak membuat keadaan semakin buruk.

Permasalahan kehilangan hutan di Indonesia merupakan permasalahan klasik. Beberapa studi mengemukakan bahwa perkebunan kelapa sawit dan pulp merupakan penyebabnya. Menurut *Global Forest Watch*, 55% hutan hilang terjadi di area konsesi yang mana penebangan diperbolehkan. Sedangkan sebanyak 45% hilangnya hutan terjadi di luar area konsesi yang legal. Kontributor utama penyumbang hilangnya hutan Indonesia ialah perkebunan kelapa sawit dan serat kayu, begitu menurut studi yang dilakukan. Sekitar 1,6 juta hektar dan 1,5 juta hektar hutan primer hilang, ini setara dengan Negara Swiss jika dibandingkan luasnya. Memang kehilangan hutan di dalam area konsesi merupakan suatu hal yang wajar, akan tetapi studi menunjukkan bahwa ini merupakan suatu hal yang mengkhawatirkan. Terhitung, 3,6 juta hektar hilang sejak tahun 2000 dan luas tersebut kurang lebih dengan tiga kali luas New York (Wijaya, dkk 2017). Proses penegakan hukum seharusnya lebih tegas mengingat meluasnya perkebunan sawit dari waktu ke waktu. Terlebih lagi banyak penebangan secara liar yang dilakukan. Kemudian yang paling penting ialah pemantauan kerja tahunan dari perusahaan untuk dapat mengontrol tingkat hilangnya hutan dan emisi karbon.

3.3.3 Hal-hal Yang Ditentang Uni Eropa

Parlemen Uni Eropa mengeluarkan sebuah kebijakan berupa Resolusi Sawit yang disahkan pada tanggal 4 April 2017. Resolusi Sawit merupakan puncak dari banyaknya kampanye negatif yang ditujukan kepada negara-negara penghasil sawit seperti Indonesia. Isi dari Resolusi Sawit adalah sebuah pelarangan penggunaan turunan minyak sawit berupa biodiesel pada tahun 2020 (Santoso, 2018). Hal ini membuat Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengekspor tertinggi merasa dirugikan. Karena bagi Indonesia pasar Eropa sangat menguntungkan dengan jumlah permintaan yang banyak.

Parlemen Eropa mempunyai beberapa mosi dasar dalam membahas Resolusi Sawit. Dalam menentukan kebijakan yang terkandung didalam Resolusi Parlemen Eropa, para pembuat kebijakan memperhatikan beberapa faktor. Faktor yang paling awal disebutkan adalah terkait tujuan pembangunan berkelanjutan PBB atau SDGs 2015-2030. Kemudian juga memperhatikan perjanjian Paris dalam

United Nations Framework Convention on Climate Change ke 21 (COP21) tahun 2015 (European Parliament, 2017). Merujuk pada PBB melalui programnya yaitu SDGs dan perjanjian yang terjadi di Paris terkait UNFCCC, Parlemen Eropa mempertimbangkan bahwa perlu adanya penanganan terkait permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh minyak kelapa sawit. Dengan faktor ini Parlemen Eropa membuat kebijakan yang mendukung PBB.

Laporan Komisi Teknis Eropa dengan judul “*The Impact of EU Consumption on Deforestation*” dan Komisi Komunikasi Eropa dengan judul “*Addressing the Challenge of Deforestation and Forestation Degradation to Tackle Climate Change and Biodiversity Loss*” juga menjadi pertimbangan Parlemen Eropa (European Parliament, 2017). Laporan-laporan terkait memburuknya kondisi lingkungan menjadi faktor penting Parlemen Eropa dalam membuat suatu kebijakan baru. Alih fungsi lahan yang semula berupa hutan dan berubah menjadi perkebunan juga berdampak besar dalam berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan hilangnya habitat para penghuni hutan.

Inisiatif-inisiatif juga bermunculan seperti Deklarasi Amsterdam pada tahun 2015 dengan judul “*Towards Eliminating Deforestation from Agricultural Commodity Chains with European Countries*” dengan didukung oleh beberapa Negara Eropa yakni Denmark, Jerman, Prancis, Inggris, dan Belanda (European Parliament, 2017). Gerakan ini jelas ditujukan pada pegiat kelapa sawit yang diharuskan untuk membuat industri sawit berkelanjutan pada 2020. Hal ini juga berkaitan dengan adanya sertifikasi yang mengharuskan para industri sawit untuk mematuhi dan melengkapi langkah-langkah demi mendapatkan sertifikasi.

Penggunaan biofuel juga menjadi acuan dalam pembuatan draft Resolusi Sawit. Pada 2016 Eropa meluncurkan strategi dalam mobilitas rendah karbon. Para akademisi juga melakukan penelitian yang didanai oleh Komisi Eropa dengan judul “*The Land Use Change Impact of Biofuel Consumed in the EU: Quantification of Area and GreenHouse Gas Impact*”. Hal ini ditambah lagi dengan adanya laporan tentang “*Globium: The Basis for Biofuel Policy Post 2020*” dan terkait sertifikasi biofuel berkelanjutan yang tertuang dalam *European Court of Auditors on the EU System for the Certification of Sustainable Biofuels* (European Parliament, 2017).

Minyak kelapa sawit memang digunakan sebagai campuran dalam bahan bakar. Hal ini bertujuan bahwa campuran tersebut dapat mengurangi penggunaan minyak bumi. Namun tetap saja campuran berupa minyak kelapa sawit masih kontroversi. Karena selalu dikaitkan dengan isu kerusakan lingkungan.

Keanekaragaman hayati juga penting diperhatikan. Alih fungsi lahan menyebabkan keanekaragaman hayati menjadi terancam, dan ini menjadi salah satu faktor juga. Luas alih fungsi lahan di Sumatera Utara yang semula sawah kemudian berubah menjadi perkebunan kelapa sawit sebesar 5000 hektar per tahun. Hal ini membuktikan bahwa alih fungsi lahan sangat luas dan berkelanjutan. Konvensi dari PBB yang bernama *United Nations Convention on Biological Diversity* (CBD) dan *Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Ditambah lagi dengan Protokol Nagoya terkait pembagian sumber daya genetik dan pembagian manfaat adil dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati. Eropa juga mempunyai strategi keanekaragaman hayati yang akan diaplikasikan pada 2020 mendatang. Lingkup Internasional tepatnya di Hawaii juga pernah digelar sebuah kongres konservasi dunia yaitu *International Union for Conservation Nature* terkait dampak ekspansi operasi kelapa sawit terhadap keanekaragaman hayati (European Parliament, 2017). Hutan merupakan rumah sekaligus habitat alami bagi makhluk hidup. Oleh karena itu keanekaragaman hayati yang ada di hutan harus dilindungi. Sebaliknya, jika dilakukan alih fungsi lahan yang mengakibatkan hilangnya rumah bagi penghuni hutan. Maka keberadaan dari makhluk hidup tersebut akan terancam dengan mencari tempat hidup yang lain atau justru terjadi kepunahan.

Keanekaragaman hayati memang harus secara adil dinikmati bersama. Terlebih bagi masyarakat yang ada di sekitar pusat keanekaragaman tersebut. Hal tersebut sudah dibahas dalam Protokol Nagoya yang didalamnya juga mengkritisi terkait *Convention on Biological Diversity* (CBD) yang mana permasalahannya terkait dengan *Acces and Benefit Sharing* (ABS). Dengan adanya Protokol Nagoya, pembagian keuntungan menjadi lebih merata, jelas dan adil (Yulia & Zainol, 2013: 272-273). Keberadaan dari Protokol Nagoya memberikan ketegasan atas pelaksanaan *Convention on Biological Diversity* dalam hal *Acces and Benefit*

Sharing. Masyarakat di sekitar pusat keanekaragaman hayati bisa terjamin kesejahteraannya. Hal ini merupakan salah satu dasar atau faktor dalam menyusun Resolusi Sawit. Keanekaragaman hayati tetap perlu dijaga, karena yang paling berhak untuk menikmati hasil dari kekayaan alam tersebut ialah masyarakat adat terdekat yang ada di kawasan hutan.

Indonesia sudah meratifikasi Protokol Nagoya pada tahun 2011 dan disahkan pada tahun 2013 di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan mempertimbangkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia agar dapat bermanfaat secara berkelanjutan untuk pembangunan kedepannya. Bagi Indonesia banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh melalui adanya Protokol Nagoya. Melindungi sekaligus melestarikan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional menjadi pertimbangan yang mendasar. Pencegahan akan pencurian keanekaragaman hayati juga perlu dilakukan tindakan preventif (Kemensesneg RI, 2013). Indonesia percaya bahwa dengan menandatangani Protokol Nagoya, akan ada aturan baru yang saling menguntungkan, terlebih Indonesia perlu mengawal dan secara tegas memberikan langkah-langkah bagaimana cara memanfaatkan keanekaragaman hayati dengan baik. Oleh karena itu Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani perjanjian tersebut dengan dalih menyelamatkan keanekaragaman hayati.

Selain keanekaragaman hayati ada hal lain yang perlu diperhatikan. Warga sekitar atau masyarakat adat yang tinggal di sekitar lahan yang akan ditanami tanaman sawit juga perlu diajak diskusi. Hal ini sudah diatur dalam Deklarasi PBB terkait Hak-hak masyarakat adat atau bisa disebut *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIPs) (European Parliament, 2017). Hal ini juga tidak jauh berbeda dengan Protokol Nagoya. Pentingnya warga atau masyarakat sekitaran pusat keanekaragaman hayati ikut menerima hasilnya adalah sebuah keharusan. Dengan ini justru yang paling berhak mendapatkan keuntungan seolah-olah masyarakat adat yang hidup di daerah tersebut. Karena memang kehidupannya bergantung pada kekayaan alam yang ada dan sudah disediakan sejak dulu.

Lebih jelasnya, UNDRIPs yang merupakan singkatan dari *United Nations Declaration on the Rights of Indigeneous Peoples* adalah sebuah deklarasi yang menginisiasi untuk melindungi warga pribumi atau masyarakat adat. Dalam hal ini yang dimaksudkan ialah tentang perlindungan masyarakat adat yang ada di sekitar pusat keanekaragaman hayati. Masyarakat adat merupakan orang yang paling dekat dan paling berhak atas kekayaan alam tersebut. UNDRIPs diadopsi pada tanggal 13 September 2007 oleh General Assembly Resolution 61/295. Di dalam UNDRIPs sendiri diatur tentang standar minimal dalam perlindungan, pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) , penghormatan hingga penjelasan bahwa masyarakat adat berhak menentukan nasibnya sendiri terkait wilayah, sumberdaya alam, dan hak atas tanah (UNDRIPs, 2008). Isi dari UNDRIPs sendiri yaitu termuat 24 paragraf pembukaan dan 46 pasal. Masing-masing pasal menjelaskan tentang hak-hak asasi internasional masyarakat adat. Masyarakat adat tidak tergantung dari peraturan suatu negara. Hak masyarakat berasal dari hukum yang mereka buat sendiri dan pemerintahan tidak bisa ikut campur dalam mengaturnya (Rinting, 2012).

Parlemen Eropa juga memperhatikan tentang beberapa laporan seperti Komite Lingkungan, Komite Kesehatan Masyarakat dan Keamanan Pangan, Komite Perdagangan Internasional dan Komite Pertanian hingga Pembangunan Desa (European Parliament, 2017). Laporan-laporan tersebut menjadi acuan bagi Parlemen Eropa untuk semakin meyakinkan bahwa butuh langkah yang pasti dalam menangani permasalahan yang diakibatkan oleh sawit. Uni Eropa memang masih butuh sawit, akan tetapi juga harus dipikirkan bagaimana menentukan agar faktor lingkungan juga tidak mengalami kerusakan.

Pada *draft* Resolusi Sawit, kebakaran hutan di Indonesia dan Borneo juga menjadi sorotan dan dengan jelas disebutkan. Parlemen Eropa menganggap bahwa kebakaran itu merupakan yang terburuk jika diamati dalam dua dekade dan sangat berakibat buruk terhadap perubahan iklim global. Kebakaran itu memang disengaja untuk perubahan penggunaan lahan. Jumlah penduduk yang terpapar akibat pencemaran udara mencapai 69 juta orang dan ribuan orang mengalami kematian dini (European Parliament, 2017). Dunia tidak akan mungkin lupa dengan kebakaran maha dahsyat yang ada di Indonesia, terlebih kebakaran itu memang

ditujuan untuk alih fungsi lahan. Dengan membakar memang cenderung lebih terjangkau biaya yang dikeluarkan untuk pembebasan lahan. Akan tetapi dampak negatif yang diakibatkan dari adanya kebakaran tersebut sangat merugikan banyak pihak, disamping asap yang dihasilkan menyebabkan polusi udara dampak yang lain ialah keanekaragaman hayati yang rusak dan perubahan iklim global yang sangat terasa.

Pada umumnya pembukaan lahan dengan cara membakar lahan, ialah untuk dipergunakan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Total 52% kebakaran yang ada di Indonesia pada tahun 2015 terjadi pada area gambut yang kaya akan karbon. Ini menjadikan Indonesia salah satu penyumbang terbesar pemanasan global yang ada di bumi. Sedangkan tidak adanya peta konsesi kelapa sawit yang akurat dan pendaftaran tanah publik, menyebabkan pihak berwajib kesulitan menentukan tanggung siapa yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan (European Parliament, 2017). Permasalahan ini juga menjadi alasan Uni Eropa menerbitkan Resolusi Sawit. Faktor kebakaran di Indonesia yang sangat mempengaruhi iklim global, membuat Parlemen Eropa merasa perlu memberikan peringatan kepada Indonesia.

Uni Eropa berkomitmen untuk membantu pihak swasta dalam menghilangkan deforestasi dari produksi komoditas pertanian seperti minyak sawit, kedelai, kertas dan produk daging sapi paling lambat pada 2020. Hal tersebut disebutkan dalam Deklarasi New York tentang hutan. Sedangkan pada tahun 2008 Uni Eropa berkomitmen untuk mengurangi deforestasi paling sedikit 50% pada tahun 2020 dan menghentikan hilangnya tutupan hutan global pada tahun 2030. Walaupun Uni Eropa sendiri masih sangat bergantung terhadap sawit, karena masih banyak yang mengkonsumsi minyak sawit hingga barang olahannya (European Parliament, 2017). Inisiasi pada Deklarasi New York menjadi salah satu acuan Eropa. Komitmen Uni Eropa dalam membantu mengurangi deforestasi tentu diwujudkan dalam sebuah aksi, yakni Resolusi Sawit.

Perdebatan di Uni Eropa memang tidak terhindarkan. Eropa menggunakan minyak sawit secara besar-besaran dikarenakan biayanya yang terjangkau. Untuk itu tidak heran jika permintaan minyak sawit sangat tinggi. Akan tetapi permintaan yang tinggi tersebut justru yang membuat perkebunan kelapa sawit semakin meluas dan daerah yang terdedorestasi semakin banyak. Data menyatakan bahwa 50% barang yang dikemas mengandung kelapa sawit. Barang ataupun produk tersebut biasanya berupa makanan olahan dan biofuel (European Parliament, 2017). Memang terlihat kontradiktif antara kebutuhan Eropa yang semakin tinggi penggunaan sawitnya, dengan keinginan Parlemen Eropa membuat Resolusi Sawit demi menyelamatkan lingkungan.

Gagalnya para perusahaan atau industri sawit membuktikan bahwa minyak kelapa sawit tersebut tidak terkait dengan deforestasi, pengeringan lahan gambut dan pencemaran lingkungan, juga masuk dalam pertimbangan Parlemen Eropa. Pada kenyataannya kelapa sawit di produksi dengan tidak memikirkan hak asasi manusia dan masih tidak sesuai dengan standard yang sudah ditentukan (European Parliament, 2017). Industri sawit memang tidak mengakui kalau alih fungsi lahan yang dilakukannya itu menimbulkan desforestasi. Akan tetapi mereka tidak bisa membuktikan secara nyata jika industrinya tidak terkait dengan deforestasi. Maka dari itu Parlemen Eropa tidak segan dalam membuat langkah pasti berupa Resolusi Sawit dengan alasan ramah lingkungan.

Dalam sektor energi impor minyak sawit Uni Eropa bertanggung jawab sebesar 60% pada tahun 2014, 46% dari minyak sawit impor digunakan sebagai bahan bakar untuk transportasi. Hal ini merupakan peningkatan empat kali lipat mulai tahun 2010. Kemudian sebesar 15% digunakan untuk pembangkit listrik dan panas (European Parliament, 2017). Dengan adanya angka-angka tersebut, membuktikan bahwa permintaan sawit terus bertambah setiap tahunnya. Akan tetapi di lain sisi, Uni Eropa menginginkan untuk penghentian campuran biodiesel berbahan sawit. ini merupakan hal yang kontradiktif. Namun Eropa pada akhirnya dengan tegas membuat Resolusi Sawit yang dapat diartikan bahwa penggunaan minyak sawit akan terhambat.

Uni Eropa memperkirakan bahwa pada tahun 2020, jumlah lahan yang akan dikonversikan untuk memproduksi kelapa sawit dalam hal biodiesel akan mencapai 1Mha (juta hektar). Dimana 0,57Mha berlokasi di Asia Tenggara. Sedangkan perubahan penggunaan lahan yang disebabkan oleh biofuel tahun 2020 di Uni Eropa adalah 8,8 Mha, yang mana 2,1 Mha akan dikonversikan di Asia Tenggara di bawah tekanan ekspansi perkebunan kelapa sawit. Setengah dari lahan tersebut mengorbankan hutan tropis dan lahan gambut. Tidak hanya itu, deforestasi yang dilakukan di hutan hujan juga menghancurkan habitat alam lebih dari setengah spesies hewan yang ada di dunia dan lebih dari dua pertiga spesies tanaman. Padahal, hutan hujan tropis merupakan rumah bagi spesies paling langka di dunia yang termasuk dalam daftar merah *International Union for the Conservation of Nature* (IUCN) dimana masuk dalam kategori yang akan terancam punah. Melalui pengamatan yang dilakukan, selama 10 tahun terakhir, sudah lebih dari 80% populasinya berkurang (European Parliament, 2017). Spesies langka memang banyak berada di hutan hujan tropis di daerah Asia Tenggara. Oleh karena itu tidak heran bahwa alih fungsi lahan akan terus menerus memakan lahan yang pada awalnya adalah hutan hujan tropis. Dengan dasar ini Uni Eropa membuat langkah untuk mengurangi kemungkinan pembukaan lahan dengan cara menekan jumlah minyak sawit yang masuk ke Uni Eropa.

Parlemen Eropa juga mendapatkan banyak laporan seputar investigasi yang mengungkapkan bahwa banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia di perkebunan kelapa sawit di berbagai negara. Penggusuran paksa, kekerasan bersenjata, pekerja anak, jeratan hutang hingga diskriminasi terhadap masyarakat adat merupakan hal yang banyak ditemui di banyak negara. Konflik lahan antara masyarakat lokal dan pihak industri sawit juga ditemukan di banyak tempat (European Parliament, 2017). Laporan-laporan tersebut semakin meyakinkan Parlemen Eropa untuk tegas membuat Resolusi Sawit. Dengan adanya Resolusi Sawit, Uni Eropa meyakini bahwa hal-hal tersebut semakin berkurang.

Kemudian terdapat pertimbangan umum yang berisi banyak sekali pertimbangan yang digunakan untuk mendukung Resolusi Sawit terbentuk. Pada poin-poin awal pertimbangan disebutkan bahwa pertanian yang berkelanjutan, ketahanan pangan dan pengelolaan hutan lestari adalah tujuan inti dari SDGs, yang mana hutan sangat penting untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Beberapa catatan bahwa alih fungsi lahan mengakibatkan deforestasi global dimana biasanya pembukaan lahan dilakukan untuk pembukaan lahan ternak atau tanaman lain. Penyebaran kota, kegiatan pertanian intensif dan perkebunan kelapa sawit juga menjadi penyebabnya. Deforestasi global juga mencatat bahwa 73% muncul dari pembukaan lahan untuk komoditas pertanian dengan deforestasi global yang dikonversikan ke perkebunan kelapa sawit (European Parliament, 2017).



BAB 5

KESIMPULAN

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, hingga saat ini Uni Eropa terus melakukan serangkaian kampanye hitam terhadap Indonesia, yang pada akhirnya berujung disahkannya kebijakan Resolusi Sawit. Hal tersebut membuat Indonesia merespon dengan upaya-upaya diplomasi. Indonesia menyebut segala bentuk diskriminasi sawit dengan sebutan “kampanye hitam”. Kampanye hitam yang dilakukan banyak pihak di Uni Eropa sangat merugikan dan mengancam ekspor sawit Indonesia. Resolusi Sawit dengan jelas menyebutkan bahwa Negara Indonesia sudah melakukan alih fungsi lahan secara besar-besaran, ditambah lagi dengan kebakaran di Borneo yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, habitat orangutan terganggu, hingga polusi udara. Karena alasan itu Uni Eropa membuat kebijakan berupa Resolusi Sawit.

Hasil karya ilmiah ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah melakukan respon berupa diplomasi. Para pemangku kepentingan negara seperti Presiden yang sudah memanfaatkan forum internasional untuk berdiplomasi. Beberapa menteri juga melakukan kunjungan ke beberapa tokoh Uni Eropa. Kemudian juga terdapat Anggota DPR yang menggelar pertemuan dengan beberapa pihak Uni Eropa. Hingga dari kalangan akademisi juga ikut andil dalam menjelaskan kepada publik terkait dinamika sawit Indonesia yang mana bagi petani Indonesia sangat penting untuk keberlanjutan hidup. Jadi Indonesia sejatinya sudah berusaha banyak dalam berupaya “merayu” kebijakan Resolusi Sawit Uni Eropa dan kampanye negatif lain.

Diplomasi memang membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk dapat sesuai dengan tujuan kepentingan luar negeri suatu negara. Indonesia sudah melakukan beberapa upaya diplomasi, walaupun hasilnya Uni Eropa masih terus melakukan kampanye hitam. Oleh sebab itu Indonesia masih perlu memaksimalkan diplomasi sawit yang akan dilakukan selanjutnya. Karena sawit merupakan komoditas penting yang dapat mengurangi jumlah kemiskinan dan meningkatkan perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Barston, R. P. 1997. *Modern Diplomacy*. New York: Longman.
- Berridge, G. R., & James, A. 2004. *A Dictionary of Diplomacy. Second Edition*. New York: Palgrave Macmillan.
- Black. 1990. *Deluxe Black Law Dictionary. Sixth Edition*. ST. Paul, Minn: West Publishing CO.
- Christiningrum, R. 2018. *Dampak Pelarangan Ekspor Sawit ke Uni Eropa*. Jakarta: Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.
- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. 2017. *Laporan Singkat Badan Kerjasama Antar Parlemen*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- Djelantik, S. 2008. *Diplomasi antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fuady, H.. dkk. 2014. Sertifikasi Biofuel. *Sertifikasi Biofuel dan Kelapa Sawit Indonesia*. Jakarta: Lipi Press.
- Greenpeace. 2010. *Bagaimana Eksploitasi Minyak Kelapa Sawit Oleh Nestle Memberi Dampak Kerusakan Bagi Hutan Tropis, Iklim dan Orangutan*. Amsterdam: Greenpeace International.
- Ministry of Foreign Affairs of Georgia. 2014. *Georgian International Economic Diplomacy: Guide Book for Diplomats Working on Economic Issues*. Georgia: Georgia.
- Hariyadi. 2014. *Mengenal Minyak Sawit Dengan Beberapa Karakter Unggulnya*. Jakarta: GAPKI.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2017. *Diplomatic Bluebook*. Japan: Ministry of Foreign Affairs of Japan.
- Moelong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Paoli, G. D. 2013. *Sawit Indonesia di Indonesia: Tata Kelola, Pengambilan Keputusan dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: The Nature Conservancy.
- PASPI. 2016. *Industri Minyak Sawit Indonesia dalam Isu Sosial Ekonomi dan Lingkungan Global*. Jakarta: Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute.
- Okano, M., & Heijmans. 2013. *Economic Diplomacy: Japan and the Balance of National Interest*. Leiden: IDC Publishers and Martinus Nijhoff Publishers.
- Rana, K. S. 2007. *Economic Diplomacy: The Experience of Developing States*. In N. B. Woolcock, *The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations*. Hampshire: Ashgate Publishing.
- Rinting. 2012. *Perlindungan Masyarakat Adat dan REDD: Sebuah Panduan Praktis*. Jakarta.
- Salim, A. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Satow, S. E. 1922. *A Guide to Diplomatic Practice*. New York: Longman Green & Co.
- Sumadji. 2006. *Kamus Ekonomi*. Jakarta: Wacana Intelektual.
- Suyatno, R. 1994. *Kelapa Sawit, Upaya Peningkatan Produktivitas*. Yogyakarta: Kanisius.
- UNDRIPs. 2008. *United Nations Declarations on the Rights of Indigeneous Peoples Resolution*. New York: United Nation.
- Usman, H. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Van Gelder, dkk. 2017. *Managing Palm Oil Risk: A Brief for Financiers*. RSPO.

World Growth. 2011. *Manfaat Minyak Sawit Bagi Perekonomian Indonesia*. World Growth.

Laporan:

Badan Pusat Statistik. 2017. *Statistik Kelapa Sawit 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.

_____. 2018. *Analisis Komoditi Ekspor 2011-2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.

European Parliament. 2017. *Report on Palm Oil Deforestation of Rainforest*. Europe: European Parliament: Committee on the Environment, Public Health and Food Safety.

Kementerian Perdagangan. 2013. *Market Brief: Minyak Sawit dan Olahannya*. Hamburg: IPTC Hamburg.

Kementerian Pertanian. 2011. *Peta Potensi dan Sebaran Areal Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia: Sistem Integrasi Sapi - Kelapa Sawit (SISKA)*. Bogor: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

_____. 2016. *Outlook Kelapa Sawit*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian .

_____. 2016. *Statistik Perkebunan Indonesia 2015-2017 Kelapa Sawit*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pertanian.

_____. 2017. *Rencana Aksi Nasional Minyak Sawit Bakal Melonjak*. Jakarta: Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Kementerian Sekretariat Negara RI. 2013. *Pengesahan Nagoya Protokol*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.

Widjaja, F. O. 2017. *Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan: Perdagangan Internasional dan Hambatannya*. Jakarta: Kementerian Perdagangan.

Jurnal, Artikel dan Skripsi:

- Alatas, A. 2015. Trend Produksi dan Ekspor Minyak Sawit (CPO) Indonesia. *Jurnal Agraris*, 1 (2) : 117-118.
- Arianti, J, dkk. 2017. Pengaruh Ekspor Minyak Kelapa Sawit/Crude Palm Oil (CPO) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Pasca Reformasi (1998-2015). *Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice*. Nomor Proceedings (ISSN 2252-3936) : 20 Juli 2017. *Universitas Widyatama* : 329-330.
- Bandung, 20 Juli Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis. Proceedings ISSN 2252-3936.
- Erman , E. 2017. Dibalik Keberlanjutan Sawit: Aktor, Aliansi, Dalam Ekonomi Politik Sertifikasi Eropa. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 43 (1) 8-9.
- Imansari, S. Y. 2017. Penetapan Kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). *Skripsi*. Jember: Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember.
- Masykur. 2013. Pengembangan Industri Kelapa Sawit Sebagai Penghasil Energi Bahan Bakar Alternatif dan Mengurangi Pemanasan Global (Studi di Riau Sebagai Penghasil Kelapa Sawit Terbesar di Indonesia. *Jurnal Reformasi*, 3 (2) : 103-105.
- Nuraeni, Y. 2017. Kinerja Ekspor Minyak Kelapa Sawit di Indonesia Tahun 1985-2015. *Skripsi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Widyastutik, & Ashiqin, A. Z. 2011. Analisis Daya Saing dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ekspor CPO Indonesia ke China Malaysia dan Singapura Dalam Skema Asean-China Free Trade Agreement. *Jurnal Manajemen & Agribis*, 8 (2) : 69-70.
- Yulia, & Zainol. 2013. Melindungi Keanekaragaman Hayati Dalam Kerangka Protokol Nagoya. *Jurnal Mimbar Hukum*, 25 (2) : 272-273.

Majalah :

Kontan. 2018. *Hambatan Ekspor CPO Makin Besar*. Jakarta: Koran Kontan.

Sukma, R. 2008. *Soft Power Tidak Akan berarti Jika Tidak Diimbangi Dengan Hard Power*. Tabloid Diplomasi.

Tabloid Diplomasi. 2018. *Soft Power Tidak Akan Berarti Jika Tidak Didampingi Dengan Hard Power*.

Website :

Ardhian , M. 2017. Mendag Curigai Kepentingan Bisnis di Balik Resolusi Sawit Eropa. <https://katadata.co.id/berita/2017/04/10/mendag-curigai-kepentingan-bisnis-di-balik-resolusi-sawit-eropa>. [Diakses pada 25 Februari 2018].

Ariefyanto, M. I. 2012. Kegagalan Diplomasi Sawit. <https://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/12/09/28/mb014x-kegagalan-diplomasi-sawit>. [Diakses pada 3 Februari 2018].

BPDP. 2018. BDPKKS Bekali Diplomat Mengenai Sawit. <http://www.bdpd.or.id/id/kegiatan/bdpkks-bekali-diplomat-mengenai-sawit/>. [Diakses pada 10 Agustus 2018].

BPDP. 2018. Menlu RI dan Malaysia Tindaklanjuti Diplomasi Sawit. <http://www.bdpd.or.id/id/berita/menlu-ri-dan-malaysia-tindaklanjuti-diplomasi-sawit/>. [Diakses pada 1 Agustus 2018].

BPDP. 2018. Tim Diplomasi Lanjutkan Diplomasi Sawit ke Vatikan. <http://www.bdpd.or.id/id/kegiatan/tim-negosiasi-lanjutkan-diplomasi-sawit-ke-vatikan/>. [Diakses pada 30 April 2018].

Budi , K. 2018. Perguruan Tinggi Digandeng Untuk Dukung Diplomasi Sawit. <https://edukasi.kompas.com/read/2018/02/05/06585031/ Perguruan-tinggi-digandeng-untuk-dukung-diplomasi-sawit>. [Diakses pada 25 Februari 2018].

- CNN Indonesia. 2018. Video: Mahathir Ajak Jokowi Lawan Kampanye Hitam Sawit Eropa. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180629155916-110-310196/video-mahathir-ajak-jokowi-lawan-kampanye-hitam-sawit-eropa>. [Diakses pada 1 Juli 2018].
- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. 2018. Kebijakan Parlemen Uni Eropa Terkait Sawit Rugikan Indonesia. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/20521/t/Kebijakan+Parlemen+Uni+Eropa+Terkait+Sawit+Rugikan+Indonesia>. [Diakses pada 30 April 2018].
- ESM Magazine. 2018. Spar Austria Removes Palm Oil From Private Labels. <https://www.esmmagazine.com/spar-austria-removes-palm-oil-private-labels/57506>. [Diakses pada 11 Oktober 2018].
- Fardaniah, Risbiani. 2018. Ini Cara Diplomasi Indonesia Perjuangkan Minyak Sawit di Eropa. <https://www.antaranews.com/berita/710047/ini-cara-diplomasi-indonesia-perjuangkan-minyak-sawit-di-eropa>. [Diakses pada 24 Oktober 2018].
- Frangoul, A. 2018. Major Supermarket Pledges to Get Rid of Palm Oil from its own Label Food. Diambil kembali dari cncb.com: <https://www.cncb.com/2018/04/10/supermarket-iceland-to-get-rid-of-palm-oil-from-own-label-food.html>. [Diakses pada 25 April 2018].
- GAPKI, 2017. Resolusi Minyak Sawit Uni Eropa & Isu Deforestasi. <https://gapki.id/news/2389/resolusi-minyak-sawit-uni-eropa-isu-deforestasi>. [Diakses pada 3 Mei 2018].
- _____, 2017. Sawit Konsisten Penyumbang Terbesar Devisa. <https://gapki.id/news/1857/sawit-konsisten-penyumbang-terbesar-devisa>. [Diakses pada 20 Februari 2018].
- _____, 2017. Sejarah Kelapa Sawit Indonesia. <https://gapki.id/news/3652/video-sejarah-kelapa-sawit-indonesia>. [Diakses pada 1 Maret 2018].
- Gibbons, Z. 2018. Biofuel Dihapus, RI Tolak Laporan Diskriminatif Parlemen Eropa. <http://ekonomi.metrotvnews.com/globals/8Kyvgd6N-biofuel-dihapus-ri-tolak-laporan-diskriminatif-parlemen-eropa>. [Diakses pada 27 Februari 2018].

Greenpeace. 2017. Laporan Greenpeace International: Hutan Indonesia Masih Dalam Ancaman Industri Kelapa Sawit. <http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Laporan-Greenpeace-International-Hutan-Indonesia-Masih-Dalam-Ancaman-Industri-Kelapa-Sawit/>. [Diakses pada 30 Agustus 2018].

_____. 2017. Borneo Orangutans in Decline, Official Survey Shows. <http://www.greenpeace.org/seasia/Press-Centre/Press-Releases/All-deforestation-in-orangutan-habitat-must-be-stopped-immediately/All>. [Diakses pada 30 Agustus 2017].

_____. 2018. Greenpeace Putuskan Hubungan Setelah APP/Sinar Mas Terkait Kembali Praktik Deforestasi. <http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Greenpeace-Putuskan-Hubungan-Setelah-APPSinar-Mas-Terkait-Kembali-Praktik-Deforestasi/>. [Diakses pada 1 Juni 2018].

Gresnews. 2017. Diplomasi Sawit Jokowi di KTT G20. <http://www.gresnews.com/berita/ekonomi/114515-diplomasi-sawit-jokowi-di-ktt-g20/>. [Diakses pada 4 Mei 2018].

Gumilar, P. 2018. Target ISPO Kelapa Sawit Tercapai 100% Pada 2020. <http://industri.bisnis.com/read/20180605/99/803333/target-ispo-kelapa-sawit-tercapai-100-pada-2020>. [Diakses pada 30 Juni 2018].

Index Mundi, 2018. *Rapeseed Oil vs Palm Oil – Price Rate of Change Comparison*. <https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rapeseed-oil&months=12&commodity=palm-oil>. [Diakses pada 18 Desember 2018].

Info Sawit. 2018. Prediksi Rabobank: Harga Minyak Sawit Bakal Melonjak. <https://www.infosawit.com/news/8082/prediksi-rabobank--harga-minyak-sawit-bakal-melonjak>. [Diakses pada 27 Juni 2018].

_____. 2018. Ini Dia Persyaratan Sebelum Sertifikasi ISPO Sawit. <https://www.infosawit.com/news/8038/ini-dia-persyaratan-sebelum-sertifikasi-ispo-sawit>. [Diakses pada 15 September 2018].

- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2018. Diplomasi Sawit, Menko Maritim Kunjungi Brussel. <https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Kunjungan-Menteri-Koordinator-Luhut-B.-Pandjaitan-dalam-rangka-diplomasi-sawit.aspx>. [Diakses pada 1 Mei 2018].
-
- _____. 2017. Diplomasi Sawit: Kemlu Siapkan Amunisi Hadapi Kampanye Negatif. <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Diplomasi-Sawit-Kemlu-Siapkan-Amunisi-Hadapi-Kampanye-Negatif-Komoditas-Sawit-RI-.aspx>. [Diakses pada 30 Juli 2018].
-
- _____. 2017. Presiden Jokowi Minta Diskriminasi Kelapa Sawit Dihentikan. <https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Presiden-Jokowi-Minta-Diskriminasi-Kelapa-Sawit-Dihentikan.aspx>. [Diakses pada 15 November 2018].
-
- _____. 2018. Grup Kerjasama Bilateral DPR RI Minta Perhatian Parlemen Eropa atas Kelapa Sawit. <https://www.kemlu.go.id/brussels/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/GKSB-DPR.aspx>. [Diakses pada 17 Oktober 2018].
-
- _____. 2018. Diskriminasi Sawit Indonesia oleh Uni Eropa Harus Dihentikan. <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Diskriminasi-Sawit-Indonesia-oleh-Uni-Eropa-Harus-Dihentikan.aspx>. [Diakses pada 3 April 2018].
- Kementerian Perindustrian, 2018. Pohon Industri Sawit. <http://www.kemenperin.go.id/download/235/Pohon-Industri-Kimia-Hulu--Turunan-Kelapa-Sawit>. [Diakses pada 12 November 2018].
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2014. Visi Misi Capres - Cawapres 2014. Diambil kembali dari kpu.go.id: <http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2014/304>. [Diakses pada 14 Juli 2018].
- Laucereno, F. S. 2017. Jokowi dan Trump Bahas Ekspor Sawit Hingga Impor Kedelai. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3553002/jokowi-dan-trump-bahas-ekspor-sawit-hingga-impor-kedelai>. [Diakses pada 1 April 2018].

- Maulana, V. 2018. Sawit Indonesia Terancam di Uni Eropa, Menlu Retno Minta Bantuan Italia. <https://international.sindonews.com/read/1280290/40/sawit-indonesia-terancam-di-uni-eropa-menlu-retno-minta-bantuan-italia-1518021235>. [Diakses pada 1 April 2018].
- Mutmainah, D. A. 2018. Luhut Temui PBB Bahas Pembatasan Sawit Uni Eropa. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180629200227-92310286/luhut-temui-pbb-bahas-pembatasan-sawit-uni-eropa>. [Diakses pada 5 Juli 2018].
- Novriansyah, D. 2017. Watch Out Black Campaign for Indonesian Palm Oil Industry. <https://www.korindo.co.id/watch-out-black-campaign-for-indonesian-palm-oil-industry/>. [Diakses pada 7 Maret 2018].
- Okezzone Finance. 2017. Semester I, Ekspor Minyak Sawit ke Uni Eropa Tumbuh 42%. <https://economy.okezzone.com/read/2017/08/28/320/1764422/semester-i-ekspor-minyak-sawit-ke-uni-eropa-tumbuh-42>. [Diakses pada 15 Februari 2018].
- Prabowo, E. 2017. Resolusi Sawit Parlemen Eropa yang Merugikan Indonesia. <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/05/155319126/resolusi-sawit-parlemen-eropa-yang-merugikan-indonesia>. [Diakses pada 1 April 2018].
- Rahayu, R. 2018. Mahasiswa Indonesia Kenalkan Role Play Sawit di Zurich. <https://www.wartaekonomi.co.id/read186452/mahasiswa-indonesia-kenalkan-role-play-sawit-di-zurich.html>. [Diakses pada 27 Juli 2018].
- RSPO. 2016. Studi Bersama ISPO-RSPO Sebuah Pencapaian Penting Dalam Kerjasama Mewujudkan Minyak Sawit Berkelanjutan di Indonesia. <https://www.rspo.org/news-and-events/news/studi-bersama-isporspo-sebuah-pencapaian-penting-dalam-kerjasama-mewujudkan-minyak-sawit-berkelanjutan-di-indonesia>. [Diakses pada 15 Mei 2018].
- Santoso, F. 2018. Kesempatan di Uni Eropa Hingga 2030. <https://kompas.id/baca/lain-lain/2018/06/21/kesempatan-di-uni-eropa-hingga-2030/>. [Diakses pada 7 Juli 2018].
- Saputra, W. 2018. Diplomasi Sawit Indonesia. <https://kolom.tempo.co/read/1105674/diplomasi-sawit-indonesia>. [Diakses pada 26 Juli 2018].

- Sawit.or.id. 2018. Lima Wujud Revolusi Sawit Indonesia. <http://www.sawit.or.id/lima-wujud-revolusi-sawit-indonesia/>. [Diakses pada 1 Juni 2018].
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2015. Inilah Prioritas Politik Luar Negeri Indonesia 5 Tahun ke Depan. Diambil kembali dari setkab.go.id: <http://setkab.go.id/inilah-prioritas-politik-luar-negeri-indonesia-5-tahun-ke-depan/>. [Diakses pada Agustus 2018].
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2017. Bertemu PM Spanyol, Presiden Jokowi Minta Dukungan Akhiri Kampanye Negatif Pada Sawit Indonesia. <http://setkab.go.id/bertemu-pm-spanyol-presiden-jokowi-minta-dukungan-akhiri-kampanye-negatif-pada-sawit-indonesia/>. [Diakses pada 1 Juli 2018].
- Setiawan, S. R. 2018. Pada 2017, Ekspor Minyak Sawit Indonesia Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/30/172547126/pada-2017-ekspor-minyak-sawit-indonesia-mencapai-rekor-tertinggi-sepanjang>. [Diakses pada 1 Maret 2018].
- Sohuturon, M. 2018. Bupati Rita, Lebaran di KPK dan Ketupat Sayur dari Suami. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180615105001-20-306275/bupati-rita-lebaran-di-kpk-dan-ketupat-sayur-dari-suami>. [Diakses pada 9 Juli 2018].
- Stefanie, C. 2018. Kolaborasi Mahathir-Jokowi Lawan Kampanye Hitam Sawit Eropa. Diambil kembali dari [cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180629151112-92-310169/kolaborasi-mahathir-jokowi-lawan-kampanye-hitam-sawit-eropa](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180629151112-92-310169/kolaborasi-mahathir-jokowi-lawan-kampanye-hitam-sawit-eropa). [Diakses pada 7 Juli 2018].
- Sukmana, Y. 2017. Bos Sinar Mas: Resolusi Uni Eropa Ganggu Ekspor Minyak Sawit Indonesia. <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/04/11/181154026/bos.sinar.mas.resolusi.uni.eropa.ganggu.ekspor.minyak.sawit.indonesia>. [Diakses pada 16 Februari 2018].
- Tempo. 2017. Pertumbuhan Ekspor Minyak Sawit Disebabkan Eropa Masih Butuh. <http://bisnis.tempo.co/read/874403/pertumbuhan-ekspor-minyak-sawit-disebabkan-eropa-masih-butuh>. [Diakses pada 11 Maret 2018].

- Vebri, H. 2018. Komoditas asal Afrika Barat yang jadi berkah bagi Indonesia. <https://industri.kontan.co.id/news/komoditas-asal-afrika-barat-yang-jadi-berkah-bagi-indonesia>. [Diakses pada 3 April 2018].
- Warta, M. 2018. Uni Eropa Tolak Sawit Indonesia, Jokowi Kirim Surat Protes. <https://bisnis.tempo.co/read/1067957/uni-eropa-tolak-sawit-indonesia-jokowi-kirim-surat-protes>. [Diakses pada 8 April 2018].
- Wijaya, dkk. 2017. Drivers of Deforestation in Indonesia, Inside and Outside Concessions. <https://www.wri.org/blog/2017/07/drivers-deforestation-indonesia-inside-and-outside-concessions-areas>. [Diakses pada 30 Agustus 2018].
- Zuraya, N. 2017. Indonesia Sampaikan Keberatan ke Uni Eropa Terkait Ekspor Sawit. <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/17/07/06/osno4r-indonesia-sampaikan-keberatan-ke-uni-eropa-terkait-ekspor-sawit>. [Diakses pada 15 April 2018].